

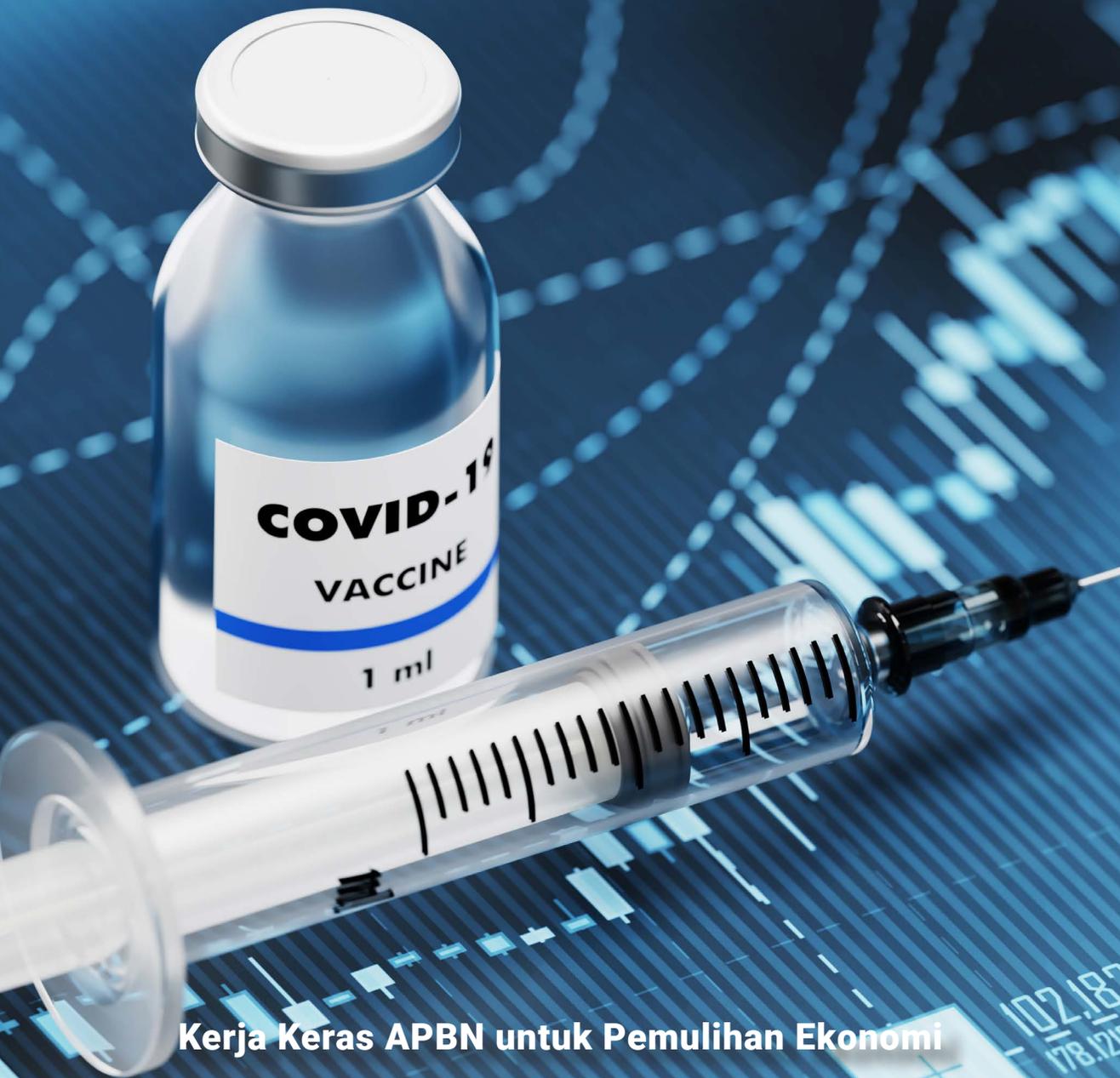


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi April 2021

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Kerja Keras APBN untuk Pemulihan Ekonomi

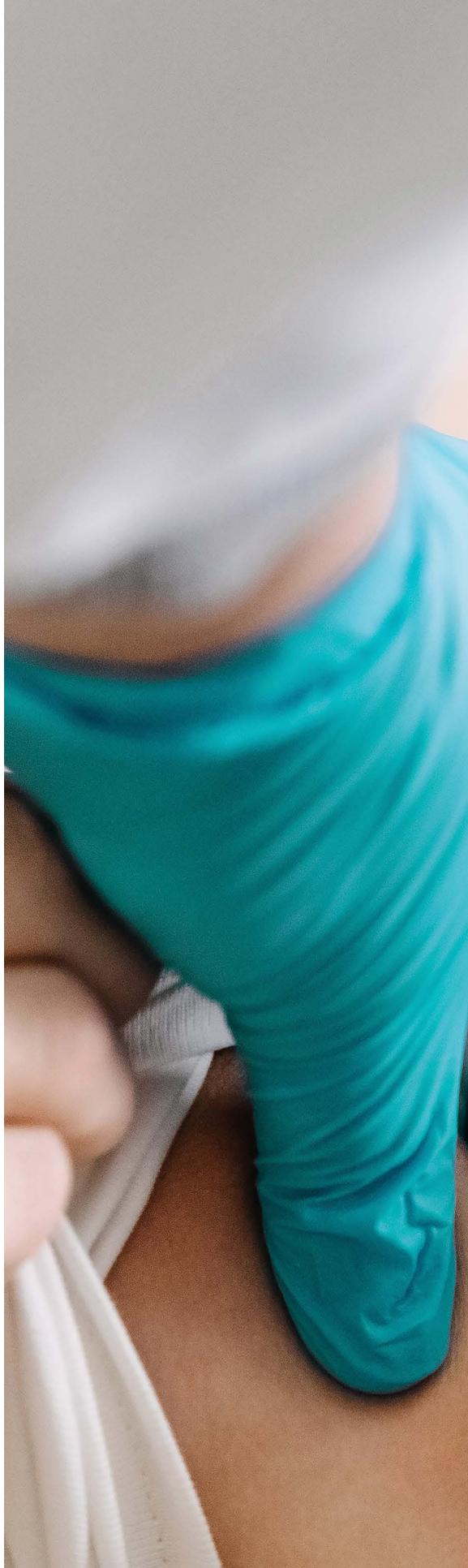


“APBN bekerja luar biasa melalui sisi belanja yang langsung masuk mempengaruhi perekonomian kita, manfaatnya dirasakan masyarakat, dan langsung mendukung kegiatan produktif investasi”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2019	15
Laporan Khusus	22
Penerimaan Perpajakan	42
Penerimaan Negara Bukan Pajak	54
Belanja Pemerintah Pusat	61
Transfer Daerah dan Dana Desa	68
Pembiayaan Utang	74





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan.

Tim Redaksi: Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan **Desain**

Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat**

Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp290,41 triliun, tumbuh 3,76 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 Rp279,89 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp228,13 triliun Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp62,29 triliun



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp88,12 triliun,

Penerimaan Hibah sebesar Rp0,29 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,08 triliun, Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp201,63 triliun dan Belanja Non-K/L sebesar Rp148,45 triliun,



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp172,96 triliun

Ringkasan Eksekutif

Proses pemulihan prospek ekonomi global terus berlanjut didorong oleh pelaksanaan vaksinasi global, stimulus fiskal, dan perbaikan aktivitas manufaktur global. Akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan sangat berpengaruh pada penurunan penyebaran Covid-19 dan akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Stimulus yang diberikan pemerintah bagi dunia usaha akan berdampak besar dalam mendukung proses pemulihan ekonomi. Kerja sama internasional diperlukan dalam menjamin distribusi vaksin ke negara berkembang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja manufaktur global melanjutkan tren ekspansi karena adanya kenaikan permintaan baru, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, serta optimisme pelaku

bisnis terhadap pemulihan global. Proses pemulihan global juga diikuti oleh pemulihan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh perbaikan beberapa indikator ekonomi. Akselerasi pelaksanaan vaksin nasional yang ditopang oleh konsistensi 3M dan 3T akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Maret 2021 telah tercatat Rp378,81 triliun atau 21,73 persen dari target pada APBN 2021. Capaian tersebut secara nominal lebih tinggi Rp2,42 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 0,64 persen (yoy). Berdasarkan realisasi komponen Pendapatan Negara, penerimaan yang bersumber dari Perpajakan secara nominal mencapai Rp290,41 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) mencapai Rp88,12 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp283,80 miliar. Capaian realisasi penerimaan Perpajakan tumbuh 3,76 persen (*yoy*), sedangkan PNBP tumbuh negatif 8,41 persen (*yoy*). Terhadap target pada APBN 2021, realisasi komponen Pendapatan Negara dari penerimaan Perpajakan telah mencapai 20,10 persen, PNBP 29,55 persen, dan Hibah 31,44 persen.

Secara lebih detil, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak telah mencapai 18,55 persen terhadap target APBN 2021. Penerimaan Pajak tersebut pertumbuhannya masih terkontraksi sebesar 5,58 persen (*yoy*). Realisasi penerimaan Pajak secara nominal masih didukung utamanya oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Penerimaan dari PPh 21, PPh Final, dan PPh Pasal 25/29 Badan secara nominal masih menjadi kontributor utama penerimaan Pajak. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas tumbuh negatif 12,19 persen (*yoy*) akibat sebagian besar komponen penerimaan PPh Nonmigas masih mengalami kontraksi pertumbuhannya. Lebih lanjut, capaian penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan

PPN Impor. Secara kumulatif penerimaan PPN/PPnBM tercatat mengalami pertumbuhan 5,35 persen (*yoy*). Capaian tersebut didukung oleh penerimaan PPN DN dan Impor yang tumbuh berturut-turut 4,11 persen dan 8,21 persen (*yoy*). Sedangkan penerimaan PPnBM, baik dalam negeri maupun impor mengalami kontraksi pertumbuhannya. PPN DN yang tumbuh positif, meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat masih tertekan dimana konsumsi rumah tangga masih lemah. Sedangkan, aktivitas ekonomi mulai bergerak dengan tren yang positif terlihat dari mobilitas bulanan yang meningkat.

Komponen penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Maret 2021 realisasinya sebesar Rp62,29 triliun atau telah mencapai 28,98 persen terhadap target APBN 2021 dan tumbuh 62,72 persen (*yoy*). Lebih rinci, pertumbuhan komponen penerimaan dari Cukai dan Bea Keluar (BK) yang tumbuh positif berturut-turut 70,10 persen (*yoy*) dan 534,85 persen (*yoy*). Sementara itu, penerimaan Cukai yang bersumber dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tercatat tumbuh 73,92 persen (*yoy*), sedangkan cukai MMEA dan EA tercatat masih tumbuh negatif meskipun mulai menunjukkan tren ke arah yang positif. Realisasi CHT didorong oleh dampak

kenaikan tarif efektif CHT dan pergeseran pembayaran pita cukai di awal tahun 2021. Lebih lanjut, komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang berasal dari Bea Masuk kinerjanya masih mengalami kontraksi sebesar 3,57 persen (*yoy*) akibat belum pulihnya aktivitas impor sebagai dampak pandemi, meskipun mulai membaik dan bergerak ke arah positif kinerjanya dibandingkan pada awal tahun 2021. Sedangkan untuk BK, pertumbuhannya masih didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor terutama Tembaga, CPO, dan Biji Kakao yang meningkat volume dan harganya, melanjutkan tren sejak akhir tahun lalu.

Realisasi PNBPN sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 mencapai Rp88,12 triliun atau 29,55 persen terhadap target dalam APBN 2021. Pencapaian realisasi triwulan tersebut bersumber dari PNBPN Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp24,12 triliun (23,17 persen terhadap APBN), PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp1,30 miliar (0,00 persen terhadap APBN), pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp40,04 triliun (36,68 persen terhadap APBN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp23,95 triliun (40,74 persen terhadap APBN)

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBPN mengalami pertumbuhan negatif atau

lebih rendah 8,41 persen (*yoy*). Turunnya realisasi hingga akhir Maret dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama berasal dari penerimaan SDA dan PNBPN dari KND yang masing-masing mengalami pertumbuhan negatif sebesar 31,16 persen (*yoy*) dan 100 persen (*yoy*). Penurunan SDA terutama disebabkan lebih rendahnya rata-rata harga minyak ICP dan realisasi lifting minyak dan gas bumi periode Desember 2020-Februari 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan negatif PNBPN dari KND disebabkan pada bulan Maret 2020 sudah terdapat setoran dividen Tahun Buku 2019 dari tiga bank Himbara. Adapun pada periode yang sama tahun 2021 belum terdapat setoran dividen Tahun Buku 2020 dari bank Himbara.

Berbeda dengan realisasi PNBPN SDA dan KND yang mengalami pertumbuhan negatif, realisasi PNBPN Lainnya dan pendapatan BLU mencatat pertumbuhan positif yaitu masing-masing 64,64 persen (*yoy*) dan 86,09 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi PNBPN Lainnya terutama berasal dari peningkatan Penjualan Hasil Tambang, Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Penempatan Uang Negara pada BBank Indonesia dan pendapatan layanan komunikasi dan informatika. Sementara pertumbuhan positif pada pendapatan BLU didominasi oleh

peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret tahun 2021 mencapai Rp523,04 triliun (19,02 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 15,61 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,08 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp172,96 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 tumbuh sebesar 25,98 persen (yoy) dari tahun sebelumnya, utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja barang dan belanja modal. Realisasi belanja barang hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp 63,77 triliun atau tumbuh 81,19 persen (yoy) utamanya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 antara lain seperti pengadaan obat-obatan dan vaksin serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Sementara itu, realisasi belanja modal telah mencapai Rp34,21 triliun atau tumbuh 186,19 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Kinerja realisasi Belanja Negara hingga akhir Maret 2021 yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya merupakan awal yang baik untuk mendukung proses pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai Rp21,39 triliun atau 12,20 persen dari pagu APBN 2021 dengan capaian realisasi meningkat sebesar 14,31 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp20,86 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp526,85 miliar.

Realisasi belanja subsidi energi s.d. Maret 2021 utamanya dipengaruhi oleh realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg yang mencapai Rp11,47 triliun atau 20,15 persen dari pagu APBN 2021, lebih tinggi 4,09 persen (yoy). Realisasi subsidi BBM dan LPG pada periode tersebut merupakan realisasi belanja subsidi bulan Januari dan Februari 2021, serta kurang bayar tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi subsidi BBM dan LPG utamanya dipengaruhi oleh realisasi subsidi LPG yang terjadi karena lebih tingginya volume konsumsi LPG tabung 3kg pada periode Januari-Februari 2021 sebesar 2,54 persen (yoy) (2020 sebesar 1,14 juta MT; 2021 sebesar 1,17 juta MT). Terkait dengan perkembangan ICP sebagai dasar realisasi subsidi Januari dan Februari 2021 yaitu pada periode Januari-Februari 2021 rata-rata sebesar USD56,77 per barel sedikit lebih rendah 6,93 persen (yoy) (2020 sebesar USD61,00 per barel). Namun, apabila dilihat kenaikan harga rata-rata ICP pada Januari - Maret 2021 (USD59,01/barel) dibandingkan

periode yang sama pada tahun sebelumnya (rata-rata USD52,07/ barel) terdapat kenaikan sebesar 13,32 persen. Hal ini merupakan imbas dari adanya kesepakatan pada pertemuan negara-negara OPEC+ untuk melanjutkan pemotongan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari hingga bulan Maret 2021 serta komitmen Arab Saudi untuk menambah pemotongan produksi secara sukarela sebesar 1 juta barel di bulan Februari dan Maret 2021 sebagai bagian dari OPEC+.

Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp9,39 triliun atau telah terserap sebesar 17,51 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi peningkatan sebesar 22,11 persen. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dilihat dari rata-rata selama periode Januari-Maret 2021 sebesar Rp14.185/USD.

Belanja subsidi nonenergi, telah terealisasi sejumlah Rp526,85 miliar atau 0,81 persen dari pagu APBN 2021 yang terdiri dari subsidi kredit program sebesar Rp381,84 miliar dan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) sebesar Rp145,02 miliar. Realisasi subsidi kredit program utamanya dipengaruhi oleh pencairan subsidi imbal jasa program PEN dalam hal ini yang terkait dengan penjaminan UMKM dan korporasi. Sementara untuk subsidi PSO dipengaruhi oleh pencairan subsidi PSO PT.

Pelni. Selain itu, untuk subsidi nonenergi lainnya seperti subsidi pupuk dan subsidi pajak, sampai dengan akhir Maret 2021 masih belum terdapat realisasi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp172,96 triliun atau 21,74 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp162,41 triliun (22,45 persen) dan Dana Desa Rp10,56 triliun (14,66 persen).

Realisasi TKDD lebih rendah 0,89 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, secara umum hal ini disebabkan oleh adanya proses pemenuhan persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemda terutama dalam penyaluran DAU yang masih terkendala dalam pemenuhan persyaratan pelaporan.

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari realisasi Dana Perimbangan Rp162,08 triliun (23,54 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp0,12 triliun (0,91 persen), dan serta Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp0,20 triliun (0,93 persen).

Realisasi TKD lebih rendah Rp4,89 triliun atau sekitar 2,93 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan realisasi TKD terutama disebabkan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih rendah Rp25,95 triliun atau sekitar 19,97 persen dibandingkan

realisasi DAU pada periode yang sama tahun 2020, perlambatan realisasi tersebut disebabkan masih terdapat Pemda yang terkendala dalam pemenuhan syarat pelaporan untuk penyaluran DAU. Di sisi lain, realisasi jenis TKD yang lain mengalami peningkatan (*yoy*) pada periode Maret 2021, diantaranya: i) realisasi DBH Rp30,03 triliun meningkat Rp17,71 triliun atau 143,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp12,32 triliun) yang terutama dipengaruhi oleh penyaluran DBH Pajak dan SDA sebesar Rp10,56 triliun dan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH TA 2019; ii) realisasi DTK (Dana Transfer Khusus) Rp28,03 triliun meningkat Rp3,23 triliun atau 13,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp24,80 triliun) yang dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp27,95 triliun atau meningkat Rp3,20 triliun (12,92 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp24,76 triliun).

Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp10,56 triliun, lebih tinggi Rp3,34 triliun (46,27 persen) dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp7,22 triliun. Peningkatan realisasi Dana Desa tersebut

dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Dana Desa ke daerah pada awal tahun karena telah terpenuhinya syarat penyaluran Dana Desa pada tahap I dan penyaluran BLT Dana Desa.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, maka Defisit Anggaran sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai Rp144,22 triliun atau sekitar 0,82 persen dari PDB (14,3 persen dari pagu APBN 2021). Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Maret 2021 ini sudah mencapai Rp322,99 triliun (32,10 persen terhadap pagu APBN). Realisasi Pembiayaan sampai akhir Maret 2021 masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp328,46 triliun. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Maret 2021 tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp337,20 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp8,74 triliun. Disamping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga sudah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar Rp5,56 triliun, Pemberian Pinjaman sebesar Rp45,9 miliar, dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp44,6 miliar. Sedangkan untuk Kewajiban Penjaminan belum ada realisasi anggarannya sampai dengan akhir Maret 2021.

Manfaat APBN Kepada Masyarakat s.d. Maret 2021, Antara Lain :

Belanja Barang :



Masyarakat mendapat suntikan **vaksin 1 (8,1 jt)** dan **vaksin 2 (2,7 jt)** → **Rp5,8 T***
Per 20 Apr: total vaksin **17,2 jt dosis**



99 rb pasien covid yang mendapat **biaya perawatan** senilai **Rp6,9 T**

*realisasi pengadaan obat/vaksin sd akhir Maret 2021



6,6 juta Pelaku Usaha Mikro menerima **Bantuan** senilai **Rp7,9 T**



3,4 juta siswa sekolah swasta (Kemenag) menerima **BOS** senilai **Rp3,7 T**



Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan senilai **Rp1,1 T**

Belanja Modal :



Pembangunan Bendungan **progres 44,37%** dari target **10 bendungan baru dan 43 lanjutan** senilai **Rp7,1 T**



Jalur KA **progres 39,66%** dari target **236,66 km^{sp}** senilai **Rp0,2 T**



Jaringan irigasi
Progres 16,47% dari target pembangunan **600 km**
Progres 18,34% dari target Rehabilitasi **3.900 km**
total senilai **Rp1,3 T**



Pembangunan Jalan **43,87 km** senilai **Rp0,4 T**



Pembangunan Jembatan **1.799,80 m** senilai **Rp0,1 T**

Belanja Bansos :



Pemberian **Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan** Bagi **96,5 juta** masyarakat miskin Peserta **PBI JKN** senilai **Rp11,5 T**



Pemberian **Bantuan PKH** kepada **9,7 juta KPM** senilai **Rp12,9 T**



Pemberian **Sembako** kepada **15,93 juta KPM** senilai **Rp11,6 T**



Pemberian **KIP Kuliah** kepada **782 rb Mahasiswa** senilai **Rp3,5 T**



Penyaluran **Bansos Tunai** kepada **9,59 juta KPM** dengan nilai **Rp10,2 T**

Penyaluran **PIP** kepada **9,8 juta siswa** senilai **Rp5,2 T**

Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-lain :



Volume Solar
2.223,24 ribu KL



Listrik Subsidi
37,3 juta (pelanggan)
11,6 tWh (volume)



Subsidi Bunga KUR *)
1,6 juta Debitur
58,5 triliun Kredit



Volume Minyak Tanah
79,01 ribu KL



Subsidi Bunga Perumahan*)
SBUM 1.736 unit rumah



Subsidi Pupuk *)
1,9 juta ton



17,96 juta masyarakat **PBPU/BP** menerima **bantuan iuran JKN** senilai **Rp115 miliar**



2,4 juta masyarakat mengikuti program **Pra Kerja** dengan realisasi anggaran **Rp8,5 T**

*) realiasi penyaluran s.d. Maret 2021, sebagian belum ditagih kepada Pemerintah

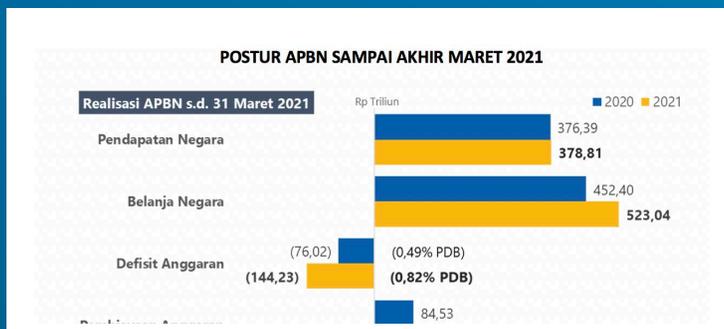


POSTUR APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2021 mencatatkan pendapatan negara tumbuh 0,64 persen (*yoy*) dan belanja negara tumbuh sebesar 15,61 persen (*yoy*), serta defisit anggaran berada pada level 0,82 persen terhadap PDB (tahun 2020 0,49 persen terhadap PDB). Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2021 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp378,81 triliun (21,73 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp376,39 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp523,04 triliun (19,02 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp452,40 triliun.

Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

- **Penerimaan Perpajakan** mencapai Rp290,41 triliun, tumbuh 3,76 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 Rp279,89 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas **Penerimaan Pajak** sebesar Rp228,13 triliun terkontraksi 5,58 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp241,62 triliun dan **Penerimaan Kepabeanan dan Cukai** mencapai Rp62,29 triliun, tumbuh 62,72 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp38,28 triliun.
- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** mencatatkan realisasi sebesar Rp88,12 triliun, terkontraksi 8,41 persen dari realisasi pada periode yang



sama tahun 2020 yang mencapai Rp96,21 triliun

- **Penerimaan Hibah** sebesar Rp0,28 triliun, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp0,29 triliun.
- **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp350,08 triliun, tumbuh 25,98 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp277,89 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi **Belanja Kementerian/Lembaga** sebesar Rp201,63 triliun, tumbuh 41,16 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp142,84 triliun; **Belanja Non-K/L** sebesar Rp148,45 triliun, tumbuh 9,92 persen dari realisasi pada periode

yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp135,05 triliun

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** sebesar Rp172,96 triliun, terkontraksi 0,89 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp174,52 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, defisit anggaran sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp144,23 triliun (0,82 persen terhadap PDB). Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp322,99 triliun, sehingga sampai dengan 31 Maret 2021 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp178,77 triliun.

Realisasi APBN s.d 31 Maret 2021 (triliun Rupiah)

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d.31-Mar	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d.31-Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.699,95	376,39	22,14	7,85	1.743,65	378,81	21,73	0,64
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.698,65	376,10	22,14	7,81	1.742,75	378,53	21,72	0,65
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	279,89	19,93	0,43	1.444,54	290,41	20,10	3,76
2. PNBP	294,14	96,21	32,71	37,12	298,20	88,12	29,55	(8,41)
II. Penerimaan Hibah	1,30	0,29	21,96	94,57	0,90	0,28	31,44	(0,57)
B. Belanja Negara	2.739,17	452,40	16,52	0,08	2.750,03	523,04	19,02	15,61
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	277,89	14,07	6,58	1.954,55	350,08	17,91	25,98
1. Belanja K/L	836,38	142,84	17,08	10,93	1.031,96	201,63	19,54	41,16
2. Belanja Non K/L	1.138,86	135,05	11,86	2,33	922,59	148,45	16,09	9,92
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	763,93	174,52	22,84	(8,79)	795,48	172,96	21,74	(0,89)
1. Transfer Ke Daerah	692,74	167,30	24,15	(7,69)	723,48	162,41	22,45	(2,93)
2. Dana Desa	71,19	7,22	10,14	(28,46)	72,00	10,56	14,66	46,27
C. Keseimbangan Primer	(700,43)	(2,17)	0,31	(93,32)	(633,12)	(65,84)	10,40	2.933,71
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.039,22)	(76,02)	7,31	(26,25)	(1.006,38)	(144,23)	14,33	89,74
% Defisit thd PDB	(6,34)	(0,49)			(5,70)	(0,82)		
E. Pembiayaan Anggaran	1.039,22	84,53	8,13	(52,48)	1.006,38	322,99	32,09	282,09
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	8,52			-	178,77		



**Prospek Pemulihan
Ekonomi Berlanjut
Seiring Pelaksanaan
Vaksinasi**

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian nasional menunjukkan prospek positif seiring dengan pelaksanaan vaksinasi dan perbaikan beberapa indikator ekonomi di kuartal I 2021.

Vaksinasi yang telah dilaksanakan di Indonesia diikuti pula dengan penurunan kasus harian Covid-19. Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut yang dicerminkan peningkatan aktivitas industri pengolahan yang tercermin dari peningkatan *Purchasing Managers' Index (PMI)* Manufaktur di Maret 2021 pada level 53,2 dibandingkan Februari 2021 sebesar 50,9. Indeks Keyakinan Konsumen di Maret 2021 berada pada level 93,4 naik dibanding posisi Februari 2021, meskipun masih dalam zona kontraksi. Tingkat konsumsi masyarakat juga

diperkirakan membaik pada Maret 2021 merujuk pada realisasi indikator Indeks Penjualan Ritel (IPR) Maret 2021 pada level 182,3 lebih tinggi dibandingkan Februari 2021 pada level 177,1. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pemberian insentif pajak bagi sektor terdampak di 2021, terutama untuk UMKM dan diharapkan akan mendorong aktivitas dunia usaha nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Maret 2021 melanjutkan tren inflasi tercatat sebesar 0,08 persen (mtm) atau 0,44 persen (ytd) yang terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi administered price. Secara umum, inflasi masih mencerminkan tingkat permintaan dan daya beli masyarakat yang terbatas akibat pandemi yang masih

berlangsung. Inflasi inti masih mengalami tren penurunan yang mencerminkan masih terbatasnya permintaan, terutama barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sandang, jasa perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Inflasi pangan kembali meningkat, didorong oleh peningkatan permintaan komoditi seperti daging ayam, bawang putih dan merah, serta ikan segar menjelang persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Namun, harga pangan menurun karena panen dan melimpahnya stok, seperti beras dan cabai merah. Inflasi *administered price* masih rendah terutama didorong oleh kebijakan untuk komoditi energi yang tetap akomodatif dalam mendukung pemulihan aktivitas ekonomi rumah tangga dan industri. Pemerintah tetap memperhatikan risiko kedepan atas peningkatan inflasi melalui koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal April 2021 sedikit mengalami tekanan seiring dengan sentimen pasar keuangan global yang didorong ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 16 April 2021 berada pada posisi Rp14.646/USD, mengalami

depresiasi sebesar 5,3 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 16 April 2021 tercatat sebesar Rp14.241,9/USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang stabil dan cukup tinggi pada akhir Maret 2021 yakni sebesar USD137,1 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini memberikan pondasi kuat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan kedepan.

Sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mengindikasikan adanya pemulihan mobilitas penduduk. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia hingga Februari 2021 tercatat sebesar 254,23 ribu kunjungan. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Februari 2021 mengalami penurunan dalam sebesar 86,59 persen dibanding jumlah kunjungan pada Februari 2020. Demikian pula, jika dibandingkan dengan bulan Januari 2021 menurun

sebesar 14,74 persen. Kondisi penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini berdampak terhadap sektor perhotelan. Data sektor perhotelan pada Februari 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai

rata-rata 32,40 persen atau turun 16,82 poin dibandingkan dengan TPK Februari 2020 yang tercatat sebesar 49,22 persen. Namun, jika dibandingkan dengan TPK Januari 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,05 poin.

DJBC DALAM INOVASI STRATEGIS

Papua *Logistic Ecosystem* Bukti Keseriusan Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional

Pemerintah kian serius melakukan penataan sistem logistik di Indonesia. Masalah logistik nasional merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi perekonomian Indonesia sehingga diperlukan upaya sinergis dalam melakukan perbaikan sistem logistik nasional.

Komitmen pemerintah ditunjukkan lewat pembentukan *National Logistic Ecosystem* (NLE) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. NLE bertujuan menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui

pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem – sistem logistik yang telah ada.

Manfaat luar biasa yang ditawarkan oleh NLE menjadikan banyak wilayah di Indonesia turut mengimplementasikannya. Setelah diimplementasikan di Batam dengan Batam *Logistic Ecosystem*, kali ini implementasi juga dilakukan di wilayah Papua lewat Papua *Logistic Ecosystem*. Papua *Logistic Ecosystem* ini nantinya akan mendorong kegiatan ekspor di wilayah Papua.

Realisasi Ekosistem Ekspor Papua dapat terwujud dengan



sinergi besama dalam upaya membangun ekosistem ekspor yang baik dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Papua. Kepala Kanwil Khusus Bea Cukai Papua menyatakan bahwa pengembangan kegiatan ekspor di Papua dan Papua Barat bertujuan menaikkan perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa program kerja dalam rangka mendorong ekspor lewat Papua *Logistic Ecosystem* ini antara lain memfokuskan penguatan internal dan daerah dengan mengubah mindset pegawai dan komitmen semua unsur dalam membangun klinik ekspor *reborn* serta menguatkan sistem untuk percepatan pelayanan, meningkatkan sinergi dengan pihak terkait mulai dari

pelaku usaha, masyarakat, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, layanan logistik, lembaga pembiayaan dan media, mengoptimalkan pendataan dan pembinaan pelaku usaha dengan menyusun *big data* dan pertukaran data dengan para *stakeholders*, dan membina pelaku usaha dengan mengutamakan sinergi dan solusi, serta upaya meningkatkan intensitas penyampaian informasi.

Dengan penerapan manajemen logistik yang baik diharapkan akan meningkatkan ekspor di Papua Barat. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut maka dilakukan ekspor perdana pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang dilakukan oleh PT Bintang Megah Jaya Papua (BMJP) dengan komoditi barang berupa

Ikan Tenggiri segar dan Ikan Kerapu segar dengan tujuan Singapura. Jumlah barang yang di ekspor kurang lebih satu ton.

Berdasarkan data, kegiatan ekspor di wilayah Papua yang dilayani oleh Bea Cukai Sorong meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2018, terdapat 1 eksportir dengan 19 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan jumlah devisa mencapai USD2.631.965, di tahun 2019 terdapat 3 eksportir dengan 107 dokumen PEB dan jumlah devisa USD3.400.868, di tahun 2020 terdapat 8 eksportir dengan 267 dokumen PEB dan jumlah devisa mencapai USD 5.248.374,

dan hingga Maret 2021 terdapat 7 eksportir dengan 110 dokumen PEB dan devisa mencapai USD1.698.963.

Papua *Logistic Ecosystem* ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan penataan logistik khususnya di wilayah Papua. Sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kanwil Khusus Bea Cukai Papua berharap sinergi dari instansi lainnya untuk dapat menyukseskan program ini demi terciptanya peningkatan dan pemulihan perekonomian di Papua dan di Indonesia.

**PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM
UPAYA ASISTENSI PELAKU UMKM**

Sebanyak 63,78 Ton Rempah- Rempah Sulawesi Tengah Tembus Pasar Internasional

Bea Cukai Pantoloan jadi salah satu instansi yang menginisiasi ekspor perdana rempah-rempah langsung dari Sulawesi Tengah. Sebanyak 63,78 ton rempah-rempah senilai Rp3,7 miliar diekspor langsung ke Vietnam dan Tiongkok pada akhir Maret lalu. Komoditas rempah-rempah tersebut terdiri atas lada putih sebanyak 50,13 ton dan bunga pala sebanyak 1,47 ton yang diekspor oleh PT. Olam Indonesia dengan tujuan Vietnam serta pala biji sebanyak 12,18 ton yang diekspor oleh PT. Yusri Multi Guna Abadi dengan tujuan Tiongkok.

Ekspor ini berhasil diselenggarakan berkat kesuksesan kerja sama antara Bea Cukai Pantoloan, Karantina Pertanian Palu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, PT. Olam Indonesia dan PT. Yusri Multi Guna Abadi, setelah sebelumnya beberapa kali mengirimkan sampel serupa ke berbagai Negara di Asia. Pelepasan ekspor perdana komoditas rempah-rempah secara bersama-sama ini membuktikan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah terhadap petani dan pelaku usaha pertanian di Sulawesi Tengah.



Kunjungi Para Pelaku Usaha, Bea Cukai Terus Gali Potensi Ekspor Daerah

Bea Cukai di berbagai daerah melakukan kunjungan ke para pelaku usaha dan UMKM untuk menggali potensi ekspor komoditas. Hal ini dilakukan dengan memberikan asistensi dan bimbingan agar dapat mendorong terwujudnya daya saing produk lokal di pasar internasional.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai mengatakan bahwa banyak manfaat dari penggalian potensi ekspor tersebut, diantaranya dapat menggenjot neraca ekspor sehingga membantu terwujudnya pemulihan ekonomi melalui kontribusi devisa negara. Jangka pendeknya, ekspor ini akan membantu pemulihan ekonomi negara dan jangka

panjangnya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku industri lokal. Beberapa Kantor Bea Cukai yang mengunjungi pelaku usaha dalam rangka menggali potensi ekspor diantaranya Bea Cukai di Magelang, Tanjung Balai Karimun, Kualanamu, Madiun, dan Kuala Langsa.

Dalam meningkatkan intensitas ekspor oleh pelaku UMKM, Bea Cukai Magelang melakukan asistensi dengan mengunjungi dua UMKM sekaligus yaitu CV Nira Lestari yang mengolah produksi gula semut tanpa pengawet, dan Rumah Industri EcoVivo rintisan dalam membuat produk ramah lingkungan seperti *bar shampoo*, *facial soap*, *natural hand sanitizer*, *facial serum* bahkan *handycraft* yang rencananya akan diekspor ke Singapura.

Kunjungan juga dilakukan

Bea Cukai Karimun dengan memberikan asistensi kepada UMKM di wilayah Moro, Kabupaten Karimun, perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan makanan berupa kerupuk tenggiri yang berpotensi untuk diekspor ke Malaysia atau Singapura.

Sementara itu, Bea Cukai Kualanamu bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang melakukan kunjungan ke salah satu pelaku UMKM yang memproduksi teh serai di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Bea Cukai memberi bimbingan teknis kepada UMKM terkait peraturan dan tata laksana ekspor serta pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE IKM).

Asistensi penuh juga dilakukan oleh Bea Cukai Langsa kepada salah satu produsen bahan makanan berupa Belacan atau

biasa dikenal dengan terasi di Desa Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu dari wilayah Ponorogo, Bea Cukai Madiun juga melirik potensi ekspor yang dimiliki oleh PT Great Giant Pineapple setelah melakukan penanaman perdana pisang *cavendish*. Bea Cukai Madiun melalui klinik ekspornya siap memberikan konsultasi dan penyuluhan terkait proses ekspor.

Diharapkan dengan diadakannya kunjungan ini, Bea Cukai dapat mengetahui setiap kendala dan kondisi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Bea Cukai siap membantu pelaku usaha agar produk yang memiliki potensi untuk diekspor dapat terealisasi dengan menjadi fasilitator dan penghubung antara UMKM dengan instansi atau pihak terkait untuk mewujudkan ekspornya.

DJBC DALAM PENGAMANAN MASYARAKAT

Bea Cukai Belawan Gagalkan Impor Limbah Plastik Terkontaminasi Sampah

Bea Cukai Belawan bersama dengan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup menggagalkan importasi satu buah kontainer yang diberitahukan sebagai *plastic scrap* namun kepadatan bercampur dengan sampah. Dari hasil pemeriksaan terhadap enam kontainer, kepadatan satu kontainer berisi *plastic scrap* yang terkontaminasi dengan sampah serta direkomendasikan untuk dikembalikan ke negara asal, sedangkan lima kontainer lainnya dinyatakan dalam kondisi bersih dan diperbolehkan untuk dipakai sebagai bahan baku.

Seperti diketahui bahwa memasukkan sampah ke wilayah Indonesia dilarang berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun xxxx tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini juga diatur dalam Konvensi Basel yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengaturan Lintas Batas Limbah Lainnya serta Pengelolaanya (*Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal*).



Sinergi yang dibangun antara Bea Cukai Belawan dan KLHK bertujuan untuk bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Tindakan tegas ini menjadi bukti bahwa Bea Cukai Belawan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kegiatan

importasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan para *stakeholder* sebagai pengguna jasa layanan pun tak henti-hentinya dilakukan, baik melalui bimbingan kepatuhan dan asistensi maupun pendekatan yang lain.

DJBC DALAM PENYEMPURNAAN LAYANAN

CEISA 4.0 Hadir, Bea Cukai Sempurnakan Layanan

Menghadapi era industri 4.0, Bea Cukai menyelaraskan perkembangan ini dengan penyempurnaan sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanannya. Bea Cukai mengadopsi konsep SMART CUSTOMS (*Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven*). Hal ini guna menciptakan potensi kolaborasi pihak terkait dan inovasi untuk pengembangan bisnis baru, serta menjadikan data sebagai katalisator bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Bea Cukai mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi *webform* bernama "CEISA 4.0" sejak tahun 2018 silam. CEISA 4.0 memudahkan integrasi dan kolaborasi antara G2G (*government to government*), B2G (*business to government*) dan B2B (*business to business*). Aplikasi yang baru dirilis 2020 ini hadir dengan berbagai perbaikan pada proses komputerisasinya. Harapannya, sistem ini menjadi bahan dasar penentuan kebijakan ke depannya, dengan

menghasilkan laporan bersifat deskriptif yang diharapkan mampu memprediksi pengambilan keputusan. Mulai dari pengembangan platformnya, teknologinya juga menunjang teknologi terkini (*artificial intelligent, block chain*, dll) yang menunjang pengawasan dan pelayanan Bea Cukai secara optimal.

CEISA 4.0 mengusung pilar *single core system*, yakni penyatuan beberapa sistem utama CEISA yang selama ini terpisah, terdiri dari banyak modul aplikasi untuk setiap layanan berbeda, baik impor, ekspor, tempat penimbunan berikat dan FTZ Area. CEISA 4.0, menurutnya mampu mengoptimalkan kegiatan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi untuk menunjang *profiling, smart targetting*, dan *passenger risk management* pada unit pengawasan.

Perjalanan sejak tahun 1990, sistem teknologi informasi Bea Cukai untuk menunjang sistem pelayanannya menjalani beberapa evolusi. Dimulai dari CFRS (*Customs Fast Release System*), kemudian



tahun 1995 yakni Pemberitahuan Impor Barang berbasis Disket, tahun 1997 Pemberitahuan Impor Barang dengan sistem EDI yang bekerja sama dengan PT Elektronik Data Indonesia, hingga diperbaharui pada tahun 2003 yakni Pemberitahuan Data Elektronik PDE Tahap II. Perubahan besar terjadi di tahun 2007, Portal Indonesia **National Single Window** menjembatani juga memfasilitasi pertukaran dokumen dalam dunia perdagangan khususnya ekspor dan impor.

Pada tahun 2012 menjadi awal berdirinya sistem CEISA. Sebuah sistem Integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa sehingga semua pengguna jasa/**stakeholder** sebagai pengguna bisa mengakses dari mana pun, kapan pun dengan koneksi internet. Lalu bertransformasi menjadi CEISA 4.0 pada tahun 2018 dan diproyeksikan semua jenis layanan dan sistem aplikasi akan rampung pada tahun 2024.

Kontinyu Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Bea Cukai Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat

Bea Cukai secara kontinyu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang salah satu indikatornya diukur melalui pelaksanaan survei. Di tahun 2020, telah dilaksanakan beberapa survei antara lain survei terkait kepuasan masyarakat yaitu survei kepuasan pengguna jasa (SKPJ) dan survei kepuasan pengguna layanan (SKPL), serta satu survei terkait intergritas yaitu survei penilaian integritas (SPI).

Direktur Kepatuhan Internal Bea Cukai, menyatakan bahwa secara ringkas, hasil dari survei tersebut di atas menunjukkan bahwa responden Bea Cukai memiliki tingkat kepuasan yang tinggi atas layanan yang telah diterima, sebagaimana hasil SKPJ dengan indeks 4,51 (skala 5) dan indeks SKPL sebesar 4,62 (skala 5). Selain itu, hasil SPI Tahun 2020 menunjukkan Indeks Integritas SPI sebesar 86,02 yang artinya Bea Cukai termasuk dalam kategori

organisasi dengan risiko rendah.

Survei kepuasan pengguna jasa dilakukan secara mandiri oleh Direktorat Kepatuhan Internal terhadap unit kerja di lingkungan DJBC. Unit kerja yang dilakukan survei yaitu 3 direktorat di lingkungan Kantor Pusat Bea Cukai, 20 Kantor Wilayah, 3 Kantor Pelayanan Utama, 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan, dan 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Secara keseluruhan, indeks Survei Kepuasan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2020 yaitu sebesar 4,51, meningkat 0,3 dari tahun sebelumnya sebesar 4,21. Survei tersebut diikuti oleh responden sebanyak 3.644 orang.

Pada tahun 2020, kerja sama survei SKPL Kementerian Keuangan dilakukan dengan Universitas Padjadjaran. Sebagai unit kerja di Kementerian Keuangan, DJBC berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai upaya untuk mengubah budaya organisasi yang berorientasi pelayanan. Pada tahun 2020, DJBC menunjukkan prestasi kinerja yang sangat baik dalam peranannya sebagai penyedia dan pelayan publik, dengan capaian IKPL DJBC 2020 sebesar 4,62. Survei tersebut dilakukan terhadap empat layanan DJBC, yaitu: Pelayanan dokumen impor (BC 2.0); Pelayanan dokumen impor untuk di masukkan ke kawasan berikat (BC 2.3);

Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0), dan; Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1) Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Indonesia, SKPL dilaksanakan dengan memilih 6 kota yang dapat merepresentasikan sebaran responden yang menjadi pengguna layanan Kemenkeu, yakni Ambon, Balikpapan, Jakarta, Medan, Makasar dan Surabaya.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan perangkat diagnostik yang dikembangkan oleh KPK bekerja sama dengan BPS sebagai alat ukur yang obyektif untuk memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD). Sejak tahun 2017, KPK memberikan kepercayaan kepada Kemenkeu d.h.i. Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melaksanakan SPI secara mandiri dengan menggunakan metodologi SPI yang diadopsi dari Integrity Assessment KPK tahun 2016. Hasil SPI Tahun 2020 menunjukkan Indeks Integritas SPI sebesar 86,02 (Internal 87,62 dan eksternal 84,43) yang termasuk dalam kategori Organisasi dengan Risiko Rendah. Hasil ini di atas rata-rata penilaian KPK pada 12 K/L/P/D sebesar 82,6.

DJBC DALAM KANCAH INTERNASIONAL

Pererat Sinergi Bilateral, Ditjen Bea Cukai Pimpin Konferensi Virtual WCO

Setelah dilantik sebagai *Vice Chair* pada *World Customs Organization* (WCO) Asia/Pacific, Ditjen Bea Cukai menyelenggarakan dan memimpin pertemuan virtual WCO bertajuk '*The 22nd Regional Head of Customs Administration* (RHCA) *Conference*' pada tanggal 6-7 April 2021.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai dalam paparannya menyampaikan inisiatif dan prioritas regional dalam penanganan Covid-19. Selain itu, sebagai tindak lanjut resolusi dewan WCO tentang peran

Bea Cukai dalam memfasilitasi importasi vaksin, Australia telah menyusun *guidelines* dan peta proses fasilitasi vaksin.

Bea Cukai Indonesia akan berupaya untuk terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan internasional. Hubungan yang baik antar instansi kepabeanan di dunia tidak hanya meningkatkan kerjasama pada sektor pengawasan, tapi juga pada sektor pelayanan dan pemenuhan kebutuhan bersama. Lebih lanjut, Indonesia berkesempatan menyampaikan



pengalaman tentang pemberian fasilitas dalam rangka importasi vaksin, serta penerapan sertifikat keterangan asal (SKA) elektronik di masa pandemi. Diharapkan *guidelines* dan *best practices* yang telah disampaikan tersebut dapat menjadi referensi untuk diimplementasikan oleh negara anggota yang lainnya.

Konferensi virtual ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya, pimpinan tertinggi Administrasi Pabean, dan 57 peserta dari 25 Administrasi Pabean di kawasan Asia Pasifik, antara lain Komisioner *Australia Border Force*, Direktur Jenderal dari Singapura, India, Iran, Maldives, Pakistan, dan Timor Leste menghadiri keseluruhan sesi pertemuan selama dua hari tersebut.

Momen pertemuan mancanegara ini juga sekaligus mengesahkan *Term of Reference (TOR) Regional Private Sector Group A/P*, yaitu platform bagi perusahaan di kawasan Asia Pasifik untuk memberikan masukan terkait isu perdagangan dan kepabeanan dari perspektif sektor swasta. Kemudian, pengesahan Nanjing *Customs Laboratory* sebagai WCO *Regional Customs Laboratory (RCL)* sehingga saat ini Asia Pasifik telah mempunyai lima RCL di Jepang, Korea, Indonesia, India, dan Cina. Serta, finalisasi *Regional Strategic Plan (RSP) 2020-2022* yang berisi arah kebijakan serta prioritas regional selama dua tahun.

Pengelolaan BMN Eks Kepabeanaan dan Cukai: Peran dan Kontribusi di Masa Pandemi

Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan isu utama dalam pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN ini dapat diketahui dengan melihat sejauh mana BMN yang dimiliki telah diutilisasi atau didayagunakan oleh Kementerian/Lembaga, baik dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pemerintahan maupun pemanfaatan BMN yang tidak digunakan dan berada di luar tugas dan fungsi utama pemerintahan. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keuangan dan perekonomian **Negara**. Ruang lingkup kategori BMN yang cukup luas mendorong fokus dan prioritas optimalisasi yang berbeda.

Salah satu kategori Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

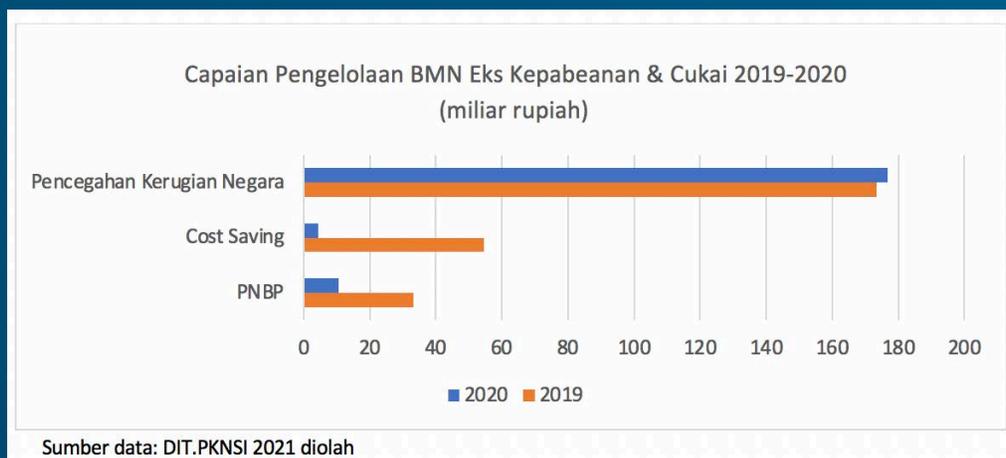
undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Kategori barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 terkait kategori Barang yang Menjadi Milik Negara dari eks Kepabeanaan dan Cukai.

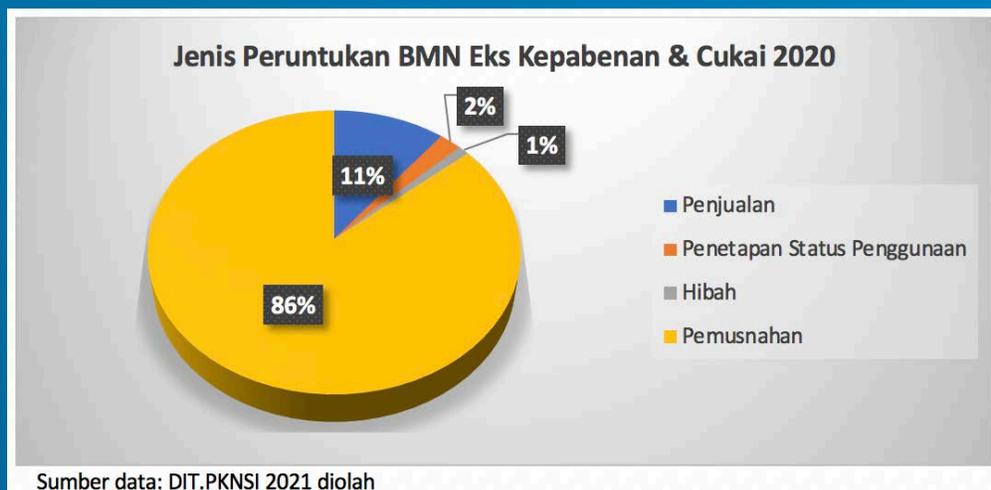
Setidaknya terdapat lima klasifikasi Barang yang Menjadi Milik Negara dari eks Kepabeanaan

dan Cukai setelah dilakukan penetapan sebagai Barang Milik Negara yaitu penjualan lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan, dan penghapusan. Kondisi demikian membatasi pilihan-pilihan fokus pengelolaan dan optimalisasi barang-barang kategori dimaksud. Sementara itu, di lain pihak, kondisi pandemi yang sedang terjadi dalam dua tahun ini sangat berpengaruh terhadap semua segi pelaksanaan pola kerja di bidang pemerintahan sehingga bagaimana intensifikasi pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara dari eks Kepabeanaan dan Cukai menjadi menarik. Apakah ada perbedaan masa sebelum pandemi dan sepanjang pandemi? Ataukah perlu strategi khusus untuk **mengelolanya**? Bagaimana kontribusinya terhadap kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah Pandemi Covid-19?

Capaian Pengelolaan Tahun 2019-2020

Tiga indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan capaian pengelolaan adalah jumlah setoran penerimaan bukan pajak (PNBP) dari hasil penjualan lelang, penghematan biaya (**cost saving**) dari kegiatan hibah atau penetapan status penggunaan, dan nilai potensi pencegahan kerugian negara jika barang tersebut beredar di masyarakat dari sisi nilainya. Pengaruh situasi pandemi nampak jelas jika membandingkan capaian PNBP dan **cost saving** di tahun 2019-2020 (Gambar 1). Capaian PNBP turun sebesar 22,6 miliar dan **cost saving** mengalami penurunan sebesar 49,9 miliar. Data tahun 2019 dan 2020 juga menyatakan bahwa potensi kerugian negara yang bisa dicegah mengalami kenaikan sebesar 3,3 miliar.





Sepanjang tahun 2020, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah memproses sepuluh permohonan penjualan dengan nilai Rp10.884.116.206, dua permohonan penetapan status penggunaan dengan nilai Rp2.679.075.000, satu permohonan hibah dengan nilai Rp1.824.375.000, dan delapan puluh satu permohonan pemusnahan dengan nilai Rp176.871.483.346.

Sejalan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah Pandemi Covid-19, pengelolaan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pusat DJKN sepanjang Tahun 2020 telah berkontribusi pada realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10,46 miliar rupiah (Grafik 2). Tak hanya itu, DJKN juga mewujudkan penghematan belanja (*cost saving*) Pengelolaan Kekayaan Negara senilai 4,5 miliar

rupiah. Nilai tersebut terbagi atas penghematan belanja berupa penetapan status penggunaan pada Kementerian/Lembaga senilai 2,68 miliar rupiah dan hibah kepada Pemda sebesar 1,8 miliar rupiah. Pemusnahan berbagai barang yang dilarang/dibatasi peredarannya senilai 176 miliar rupiah mencerminkan sinergi dalam mewujudkan misi DJKN untuk mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum, serta misi DJBC yaitu menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Akselerasi Pengelolaan BMN eks Bea Cukai

Di tengah segala keterbatasan akibat adanya pandemi Covid-19, nilai pengelolaan aset eks Kepabeanan dan Cukai justru meningkat secara signifikan. Peningkatan ini dapat dilihat dari data persetujuan yang

Pengelolaan Aset Eks Bea Cukai Q1 2021				
No	Jenis Peruntukan	Jumlah Berkas	Nilai	+/- Nilai yoy
1	Penjualan	13	Rp10.586.013.782	276,43%
2	Penetapan Status Penggunaan	1	Rp438.334.762	-83,64%
3	Hibah	0	Rp0	0,00%
4	Pemusnahan	29	Rp77.626.875.083	250,15%
Total s.d. 31 Maret 2021		43	Rp88.651.223.627	220,49%

Sumber data: DIT.PKNSI 2021 diolah

telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN. Sampai dengan 31 Maret 2020, nilai persetujuan peruntukan barang yang menjadi milik Negara meningkat secara kumulatif sebesar 220,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini dimungkinkan terjadi antara lain karena telah difasilitasinya persuratan dan penerbitan persetujuan melalui *Office Automation* (OA) Kemenkeu, pola pelayanan yang bergeser melalui *online (paperless)*, dan terus dipupuknya sinergi antara DJKN dan DJBC dalam penyelesaian aset eks Kepabeanaan dan Cukai. Faktor keterbatasan pertemuan fisik dan situasi penyebaran pandemi dapat diantisipasi oleh para stakeholder dengan baik.

Lebih detail lagi, data terbaru di kuartal pertama tahun 2021 menunjukkan jenis permohonan peruntukan BMN didominasi penjualan terhadap barang yang masih memiliki nilai ekonomis sebesar 10,5 miliar dan pemusnahan barang yang dilarang/dibatasi peredarannya serta bersifat membahayakan bagi masyarakat dengan nilai 77,6 miliar. Dukungan

terhadap penanganan pandemi juga ditunjukkan dalam surat persetujuan penetapan status penggunaan terhadap masker sebanyak 8.800 unit dan alat kesehatan pada satuan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total nilai sebesar Rp.438.334.762,- . Langkah ini menjadi satu kontribusi yang cukup baik dari DJKN dan DJBC sebagai upaya bersama untuk turut membantu penanganan pandemi Covid-19 di tanah air. Kedepannya, frekuensi maupun nilai peruntukan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan koordinasi intensif yang dilakukan DJKN dan DJBC.

Strategi ke Depan

Situasi pandemi secara tidak langsung membawa semua instrumen yang terlibat dalam pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai pada kebiasaan yang baru. Kemajuan teknologi dan perubahan pola kerja untuk optimalisasi pengelolaan BMN diyakini banyak berkontribusi pada akselerasi pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai saat

ini. Meski demikian, beberapa kendala masih perlu dimitigasi, yaitu proses permohonan melalui *Office Automation* (OA) Kemenkeu yang terkendala, pemahaman pilihan optimalisasi pengelolaan yang masih belum seragam lintas kantor operasional, kendala jaringan di area terpencil, dan penyelarasan aturan-aturan terbaru. DJKN bersama DJBC dituntut untuk meminimalisasi kendala dan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai. Langkah strategis yang diambil antara lain pembaruan regulasi, mekanisme permohonan, pelayanan, dan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) secara *online*, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Guna memastikan regulasi pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai sesuai perkembangan kebutuhan riil di lapangan, DJKN Bersama DJBC telah merampungkan draf revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai dan saat ini sedang dalam proses harmonisasi. Diharapkan pembaruan peraturan teknis ini dapat semakin menguatkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai dalam pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai.

Pembaruan kerangka regulasi juga didukung oleh penguatan budaya kerja yaitu pengajuan permohonan, pelayanan, dan Wasdal secara *online*. Baik DJBC selaku pemohon maupun DJKN sebagai pengelola barang berkomitmen untuk mengintensifkan pengelolaan BMN eks Kepabeanaan dan Cukai melalui media daring. Tak hanya peningkatan nilai dan frekuensi, hal ini juga berbuah pada semakin optimalnya skema Wasdal terhadap persetujuan yang telah diterbitkan sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan menghasilkan nilai tambah bagi pengelolaan kekayaan Negara.

Poin terakhir yang tak kalah penting ada pada sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset. Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan di lingkungan DJKN maupun DJBC. Media yang digunakan antara lain melalui Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), forum diskusi, maupun *sharing session*. Keseluruhan langkah-langkah di atas dilakukan guna mencetak insan pengelola kekayaan Negara yang cakap dan andal sehingga mampu memberikan sumbangsih yang tertinggi di masa kebiasaan baru.

Menuju 15,2 Juta SPT

Hajatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi selesai pada 31 Maret 2021 lalu. Pada April 2021 pemerintah masih menunggu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang akan jatuh tempo pada 30 April 2021.

Apakah dengan demikian wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan ketika tanggal jatuh tempo itu telah lewat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunannya lagi?

Tentu tidak demikian. Seluruh wajib pajak yang wajib lapor SPT masih tetap memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunannya sesuai dengan kewajiban konstitusi yang telah ditetapkan. Kontribusinya untuk negara teramat penting dalam penanganan pandemi pada saat ini.

Mencermati musim penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah lewat, SPT yang masuk berdasarkan data yang ada per Kamis, 01 April 2021 pukul

00:00:44 WIB sebanyak 11.277.713 SPT.

Jumlah ini lebih tinggi 25,78 persen atau 2.311.739 SPT dibandingkan tanggal yang sama di tahun lalu yang berjumlah 8.965.974 SPT.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan persentase target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2021 sebesar 80 persen dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Ini berarti sampai akhir tahun 2021 harus ada SPT yang masuk sejumlah 15,2 juta SPT.

Jumlah sebesar 11.277.713 SPT ini setara 73,68 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun di dalam data ini masih terdapat data SPT Tahunan pembetulan yang masuk sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang lebih pasti.

Secara keseluruhan jumlah

penyampaian SPT di musim penyampaian SPT Tahunan mulai Januari sampai dengan Maret 2021 menjadi modal besar untuk menyumbang pencapaian tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak.

Oleh karena itu, di masa itu, Kementerian Keuangan

mengerahkan segala upaya secara besar-besaran untuk mengkampanyekan SPT Tahunan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Tujuannya membangkitkan kesadaran wajib pajak agar mereka segera melaporkan SPT Tahunan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

Jenis Wajib Pajak	SPT	%
Wajib Pajak Orang Pribadi	10.958.636	97,17
Wajib Pajak Badan	319.077	2,83
Jumlah	11.277.713	100

SPT Elektronik

Jumlah SPT Tahunan yang masuk sampai 01 April 2021 pukul 00:00:44 WIB ini terdiri dari SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 10.958.636 SPT dan Wajib Pajak Badan sebanyak 319.077 SPT.

Diketahui pula jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik sebanyak 10.831.364 atau setara 96,04 persen dari total SPT yang masuk. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara manual sebanyak 446.349 SPT.

Penyampaian SPT Tahunan	2020		2021	
	SPT	%	SPT	%
Secara Elektronik	8.641.356	96,38	10.831.364	96,04
Manual	324.618	3,62	446.349	3,96
Jumlah	8.965.974	100	11.277.713	100

Dari data itu dapat dikatakan bahwa Kementerian Keuangan berhasil mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik dan daring melalui situs web pajak.go.id meskipun masih

terdapat berbagai kendala yang ada untuk itu.

Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang disediakan

oleh Kementerian Keuangan dan pihak ketiga. Ada yang melalui, e-Filing DJP, e-Form, e-SPT, dan e-Filing Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Jumlah SPT yang masuk yang disampaikan secara elektronik sebanyak 10.831.364 SPT dapat diperinci sebagai berikut.

Saluran Elektronik	SPT 2021	%
e-Filing DJP	9.926.565	91,65
e-Form	726.869	6,71
e-SPT	166.259	1,53
e-Filing PJAP	11.671	0,11
Jumlah	10.831.364	100

Wajib pajak yang menggunakan e-Filing DJP mengakses aplikasi e-Filing melalui situs web pajak.go.id sehingga wajib pajak tidak perlu datang lagi ke kantor pajak untuk melaporkan SPT.

Sedangkan e-Filing PJAP diakses melalui situs web yang disediakan oleh PJAP. PJAP adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak. Sampai dengan saat ini terdapat empat belas PJAP yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib pajak dapat juga menggunakan e-Form di situs web pajak.go.id untuk melaporkan SPT. Bedanya dengan e-Filing, wajib pajak terlebih dahulu mengunduh formulir SPT untuk kemudian diisi secara luring (*offline*), ini tentunya memudahkan wajib pajak

yang tak perlu selalu terhubung dengan internet, lalu setelah wajib pajak mengisinya wajib pajak melaporkannya di laman web tersebut.

Sedangkan untuk e-SPT, wajib pajak mengisi SPT Tahunan dalam dokumen berbentuk csv yang kemudian setelah diisi dokumen itu disimpan dalam cakram padat atau disk lepas dan disampaikan ke kantor pajak via pos, kurir, atau ekspedisi. Wajib pajak juga bisa mengirimkannya melalui surat elektronik.

SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari data SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk sejumlah 10.958.636 SPT dapat diperinci jumlahnya masing-masing untuk SPT yang disampaikan dengan formulir 1770 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan, formulir 1770S untuk wajib pajak karyawan, dan formulir

Formulir SPT Tahunan	SPT	%
SPT 1770	1.044.409	9,53
SPT 1770S	5.898.905	53,83
SPT 1770SS	4.015.322	36,64
Jumlah	10.958.636	100

1770SS untuk wajib pajak yang penghasilannya di bawah Rp60 juta.

Penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2021 ini didominasi oleh SPT Tahunan dalam bentuk formulir 1770S yaitu sejumlah 5.898.905 SPT.

Pada 2020 lalu, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hanya mencapai 77,63% (14.754.855 SPT) dari target sebesar 80%

(15.205.435 SPT). Waktu itu masih ada kekurangan sebanyak 450.580 SPT untuk mencapai target.

Di tahun ini, Kementerian Keuangan masih memiliki waktu yang cukup agar target kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan bisa diraih. Unit vertikal DJP di seluruh Indonesia bekerja keras untuk mencapai target kepatuhannya masing-masing, selain terpenting adalah target penerimaan pajak.

Unlock Enam Fitur Kring Pajak 1500200

Di pekan kedua Maret 2021, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI meluncurkan inovasi pembaharuan pilihan menu layanan telepon Kring Pajak 1500200. Melalui teknologi *Interactive Voice Response* (IVR), wajib pajak yang memasukkan data NPWP dapat mengakses enam *fitur* layanan Kring Pajak. Inovasi ini bertujuan untuk makin mengoptimalkan layanan Kring Pajak di masa pandemi.

Pembagian layanan bagi wajib pajak yang memberikan data NPWP dan tidak ber-NPWP sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama, hanya saja layanan yang ditawarkan masih terbatas. Tujuan awalnya adalah untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

Bagi wajib pajak yang tidak meng*input* data NPWP, informasi yang diberikan terbatas pada informasi tata cara pendaftaran NPWP, informasi kurs pajak, informasi pengukuhan PKP, informasi alamat unit kerja DJP,

informasi validasi NPWP, serta informasi pembayaran dan pelaporan pajak.

Khusus untuk informasi pembayaran tanpa ber-NPWP, informasi yang diberikan terbatas pada cara bayar pajak melalui bank/kantor pos, *billing system* dan ATM, serta batas waktu pembayaran pajak. Selain itu, untuk informasi pelaporan pajak tanpa ber-NPWP, informasi yang diberikan terbatas pada cara lapor Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk kertas dan elektronik, serta batas lapor SPT. Untuk layanan pelaporan ini tidak termasuk cara mengisi SPT tersebut.

Bagi wajib pajak yang memasukkan NPWP, terdapat enam *fitur* yang dapat diakses yaitu layanan lupa EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dan permintaan kode verifikasi (token); layanan perubahan data wajib pajak, penetapan wajib pajak Non-Efektif (NE), dan pengaktifan

kembali wajib pajak NE; informasi dan aplikasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); informasi dan aplikasi Pajak Penghasilan (PPH); informasi dan aplikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM); serta layanan pengaduan.

Layanan lupa EFIN dan permintaan kode verifikasi untuk lapor SPT Tahunan adalah layanan yang paling banyak diakses selama masa pelaporan SPT Tahunan, yaitu di Maret hingga April. Sebelum mendapatkan informasi tentang EFIN atau token, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu melalui mekanisme PORO (*Proof of Record Ownership*).

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang menelepon adalah benar-benar wajib pajak yang berhak mendapatkan informasi. Pasalnya, EFIN bersifat rahasia dan menjadi kunci wajib pajak dalam mengakses akun *djponline*. Wajib pajak baik orang pribadi atau badan hanya boleh menanyakan EFIN miliknya sendiri.

Ragam Layanan Wajib Pajak

Mungkin belum banyak yang tahu, layanan perubahan data wajib pajak yang biasanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebenarnya dapat dilakukan melalui Kring Pajak. Inovasi ini telah dilakukan sejak akhir 2020. Perubahan data yang dapat dilakukan oleh wajib pajak saat

ini terbatas pada perubahan data alamat dalam satu wilayah KPP tempat terdaftar, perubahan data alamat email, dan perubahan data nomor telepon, baik telepon kabel maupun ponsel.

Inovasi lainnya yang saat ini dapat dinikmati oleh wajib pajak yaitu penetapan wajib pajak NE dan pengaktifan kembali WP NE. Namun, permohonan penetapan wajib pajak NE melalui layanan Kring Pajak ini baru terbatas untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP; atau wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif. Syarat administratif mempunyai NPWP biasanya diminta oleh pihak bank sebagai syarat pembukaan rekening baru atau ketika wajib pajak dalam proses memperoleh pekerjaan.

Dengan inovasi layanan melalui Kring Pajak ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan NE tanpa harus ke KPP. Ini adalah hal yang menggembirakan sebab di masa pandemi wajib pajak mengalami keterbatasan mobilitas ke luar rumah. Dengan pengajuan

permohonan NE melalui Kring Pajak, risiko terpapar COVID-19 dapat diperkecil.

Untuk layanan terkait pembayaran yang memerlukan data NPWP, yaitu pembuatan kode *billing* dan permohonan informasi tentang NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), petugas Kring Pajak akan terlebih dahulu melakukan verifikasi data sebelum layanan informasi diberikan kepada wajib pajak. Permohonan pembuatan kode *billing* dibatasi maksimal dua permohonan per telepon, sedangkan untuk informasi NTPN maksimal satu permohonan per telepon.

Untuk layanan informasi dan aplikasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak dapat meminta layanan informasi terkait KUP, PBB Sektor P-3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan), atau Bea Meterai dan aplikasi yang berhubungan dengan itu.

Wajib pajak juga dapat mengakses layanan terkait konfirmasi kewajiban wajib pajak berupa ketetapan baik berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP). Layanan ini diberikan paling banyak tiga permohonan per telepon.

Di ranah pelaporan, wajib pajak dapat melakukan konfirmasi pelaporan SPT untuk maksimal 3 Masa Pajak dan 2 Tahun Pajak yang berbeda. Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan konfirmasi terkait Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang telah diterbitkan oleh DJP. Konfirmasi ini terbatas pada

tiga NPWP per panggilan telepon.

Untuk informasi terkait Pajak Penghasilan (PPh), wajib pajak dapat menanyakan tentang validasi Surat Keterangan PP 23. Validasi ini berperan penting agar pemotong PPh dapat memutuskan perlakuan perpajakan terhadap pemilik Surat Keterangan PP 23 yang ditanyakan. Selain itu wajib pajak juga dapat meminta informasi terkait aplikasi PPh seperti e-Bupot, e-SPT PPh Pasal 21, e-SPT PPh Pasal 22, serta e-SPT PPh Tahunan orang pribadi maupun badan.

Untuk informasi terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), wajib pajak dapat menanyakan terkait aturan PPN dan PPnBM termasuk aplikasi e-Faktur dan perpanjangan sertifikat digital.

Jadi tunggu apa lagi? **Unlock fitur** layanan Kring Pajak dengan menyediakan data NPWP. Pastikan untuk menjawab verifikasi data yang dilakukan oleh petugas dengan informasi yang sesuai untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Di masa pandemi, ternyata urusan perpajakan bisa diselesaikan tanpa antre ke KPP. Lindungi diri sendiri dari penyebaran wabah pandemi sambil mencari solusi masalah perpajakan dengan layanan Kring Pajak 1500200.

Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Sukuk Wakaf

Wakaf merupakan investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya dapat terus dirasakan bahkan setelah pemberi wakaf (waqif) meninggal. Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut KBBI, wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.

UU Nomor 41 tahun 2004 juga mengatur tentang pembentukan lembaga independen yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI hadir

untuk membina pengelola wakaf (nazhir) agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Potensi wakaf di Indonesia masih sangat besar untuk digali, sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp217 triliun atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia. Wakaf digunakan untuk penggunaan yang produktif, di antaranya adalah penyediaan sarana prasarana kesehatan gratis bagi dhuafa, pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah, pengembangan *Endowment Fund* untuk lembaga sosial, pengembangan dana CSR untuk kegiatan sosial, Pemanfaatan lahan nonproduktif untuk peternakan/perkebunan

(potensi 420ribu ha), layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan UMKM, dan program umrah gratis untuk guru-guru di daerah.

Sebagai upaya pengembangan wakaf uang, Pemerintah menyediakan instrumen Sukuk Negara yaitu **Cash Waqf Linked Sukuk** (CWLS) / Sukuk Wakaf. Penerbitan Sukuk Wakaf bertujuan untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf agar dapat melakukan wakaf uang dengan aman dan mudah. Perbedaan Sukuk Wakaf dengan instrumen SBSN Ritel lainnya seperti Sukuk Ritel atau Sukuk Tabungan adalah, bagi hasil/imbalannya tidak diterima oleh investor, melainkan disalurkan kepada Nazhir. Sementara itu, investor dapat memilih untuk menerima kembali nilai pokoknya saat jatuh tempo (wakaf temporer) ataupun memberikan nilai pokok saat jatuh tempo kepada Nazhir untuk disalurkan sebagai wakaf pula (perpetual). Imbalan dan/atau nilai pokok yang diwakafkan tersebutlah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam mendorong konsolidasi dana sosial Islam untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan nonAPBN/APBD. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif, serta berpartisipasi

langsung dalam mendukung akselerasi kekuatan ekonomi kerakyatan.

Sukuk wakaf pertama kali diterbitkan pada tahun 2020, yaitu seri SW001 dengan metode **Private Placement** pada bulan Maret 2020 yang menggunakan sistem diskonto dan kupon. Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi dan akan digunakan untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa serta pengadaan mobil **ambulance** di Rumah Sakit yang sama.

Selanjutnya, pada bulan November 2020, untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan Sukuk Wakaf Ritel yang ditujukan untuk individu dan institusi, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, antara lain pembangunan klinik, pendampingan UMKM, pembelian alat bantu dengar untuk tunarungu, bantuan modal usaha, dan program beasiswa kaum dhuafa. Meski di tengah pandemi, penerbitan Sukuk Wakaf Ritel SWR001 masih cukup diminati masyarakat Indonesia.

Tahun 2021 ini, pemerintah

kembali menerbitkan Sukuk Wakaf Ritel seri SWR002 yang ditawarkan mulai tanggal 9 April sampai dengan 3 Juni 2021 dengan tenor 2 tahun dan tingkat imbalan tetap sebesar 5,57% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial

yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. SWR002 ditawarkan melalui 6 mitra distribusi, yang masing-masing akan dikelola oleh Nazhir dengan peruntukan yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

Mitra Distribusi	Nazhir	Program Sosial
PT. Bank Syariah Indonesia	LazisNU	<ul style="list-style-type: none"> • Klinik Pesantren, • Beasiswa Santri Dhuafa, • Bantuan Modal UMKM
	LazisMU	<ul style="list-style-type: none"> • Bakti Guru • Beasiswa Mentari • Beasiswa Sang Surya • Pemberdayaan UMKM • Indonesia Mobile Clinic
PT. Bank Muamalat Indonesia	Baitulmaal Muamalat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Beasiswa Sarjana • Program Sahabat UMKM
PT. Bank CIMB Niaga Syariah	Dompot Dhuafa Republika	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa • Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Dhuafa
PT. Bank Permata Syariah	Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan
PT. Bank Mega Syariah	Badan Wakaf Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Mobile Screening Retina dan Katarak Banten
	Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Yatim Dhuafa
PT. Bank Syariah Bukopin	Wakaf Bangun Nurani Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat melalui ternak hewan • Renovasi Gubug Ngaji
	Yayasan Global Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf Modal UMKM • Lumbung Beras Wakaf

Dengan berinvestasi melalui Sukuk Wakaf, investor/wakif berkesempatan untuk melakukan amal jariyah sekaligus berpartisipasi dalam

pembangunan Indonesia, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Pelaksanaan dan Percepatan Program PEN untuk Menggerakkan Perekonomian

Salah satu kebijakan *extraordinary* yang dikeluarkan Pemerintah dalam menghadapi kejadian *extraordinary* akibat pandemi Covid-19 adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp695,2 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu, dan terus dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun demi percepatan penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong kinerja dunia usaha. Alokasi tersebut terbagi ke dalam 5 sektor, antara lain: sektor kesehatan sebanyak Rp175,52 triliun, perlindungan sosial sebanyak

Rp150,88 triliun, program prioritas sebanyak Rp125,17 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp191,13 triliun, dan pemberian insentif usaha sebesar Rp56,72 triliun.

Sampai dengan 16 April 2021, realisasi program PEN telah mencapai Rp134,07 triliun atau 19,2 persen dari target. Di sektor kesehatan, realisasi mencapai Rp18,59 triliun terutama untuk mendukung pelaksanaan 3T dan 3M, bantuan luran JKN, serta pemberian insentif perpajakan kesehatan. Di samping itu, perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp47,92 triliun terutama untuk penyaluran berbagai program bansos untuk keluarga miskin antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH); Kartu Sembako; dan Bansos Tunai, serta program bansos lainnya yaitu BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan bantuan

kuota internet untuk peserta dan tenaga didik., Pemerintah juga menggenjot pelaksanaan program prioritas dengan realisasi hingga pertengahan April sebesar Rp14,90 triliun, terutama digunakan untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT dan pengembangan kawasan strategis.

Selanjutnya, dukungan kepada dunia usaha telah terealisasi untuk dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp37,71 dan pemberian insentif usaha sebesar Rp14,95 triliun. Dukungan Pemerintah kepada UMKM dan korporasi telah tewujud berupa Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM), pemberian IJP UMKM dan korporasi untuk KMK dijamin, serta penempatan dana pada perbankan. Terakhir, insentif kepada dunia usaha telah diberikan berupa insentif atas PPh21 DTP, PPh final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan Penurunan Tarif PPh Badan.

Kelanjutan program PEN juga mencerminkan APBN telah kerja keras secara luar biasa dengan fokus untuk mengembalikan rakyat dan ekonomi agar dapat pulih dari Covid-19 ini. Peningkatan alokasi program PEN hingga 21 persen dari realisasi sementara tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi *game changer* atau daya dorong yang efektif untuk pemulihan ekonomi, terutama di Triwulan I 2021.

Konsumsi dan Impor Menguat, Dorong Pertumbuhan PPN



Penerimaan Pajak

Sampai dengan 31 Maret, penerimaan pajak tahun 2021 tercatat sebesar Rp228,13 triliun (lihat tabel 1). Dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.229,58 triliun, capaian realisasi penerimaan telah mencapai 18,55 persen. Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2020, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan Maret berada pada level -5,58 persen (*yoy*), sedikit melambat dibandingkan kinerja sampai dengan Februari yakni -4,84 persen (*yoy*). Perlambatan ini disebabkan peningkatan restitusi, serta adanya penerimaan tahun 2020 yang tidak berulang pada tahun 2021. Namun secara umum kinerja penerimaan pajak masih melanjutkan tren membaik sejalan dengan semakin pulihnya konsumsi masyarakat. Hal ini

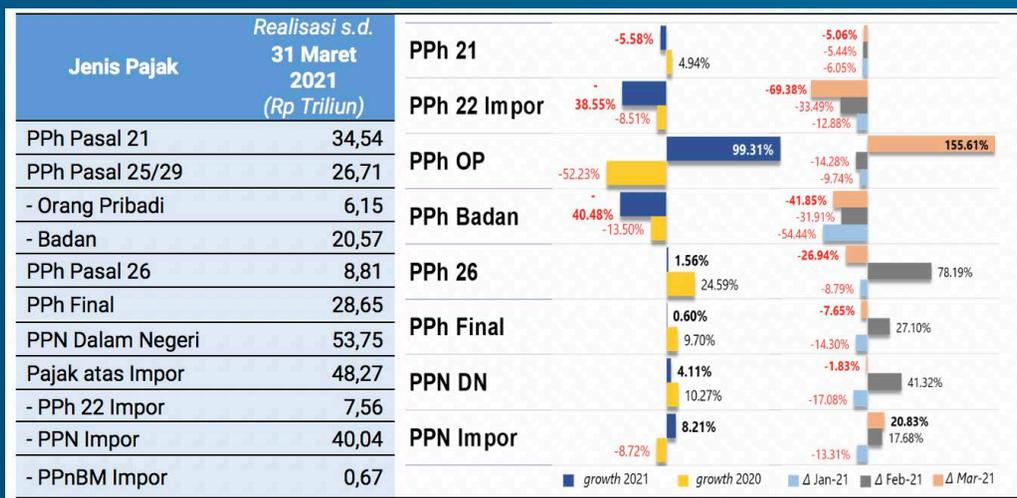
terlihat dari terus membaiknya PPN & PPnBM, yang sampai dengan Maret tumbuh 5,35 persen (*yoy*), menguat dibandingkan 5,24 persen (*yoy*) sampai dengan Februari.

Hingga bulan Maret, beberapa jenis pajak masih melanjutkan kinerja pertumbuhan positif (lihat tabel 2)s. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan jenis pajak PPh Orang Pribadi, yakni pada level 99,31 persen (*yoy*), didorong **event** pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Hingga 31 Maret (batas waktu pelaporan), jumlah SPT PPh Orang Pribadi yang dilaporkan mencapai 11,27 juta SPT, naik dari 8,97 juta SPT pada tahun lalu atau tumbuh 25,78 persen (*yoy*). Namun demikian, perlu diingat bahwa pada tahun 2020 batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diberikan relaksasi satu bulan, menjadi 30 April,

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

Uraian	Target 2021 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Maret 2021		
		Rp (Triliun)	Δ% '20-'21	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	128,63	-12,98	18,81
- Non Migas	638,00	120,72	-12,19	18,92
- Migas	45,77	7,91	-23,49	17,28
PPN & PPnBM	518,55	96,89	5,35	18,69
PBB dan Pajak Lainnya	27,26	2,61	42,91	9,57
Jumlah	1,229,58	228,13	-5,58	18,55

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)



akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 relaksasi ini tidak lagi diberikan, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pembayaran PPh OP Tahunan (Pasal 29) satu bulan lebih awal dibandingkan tahun lalu.

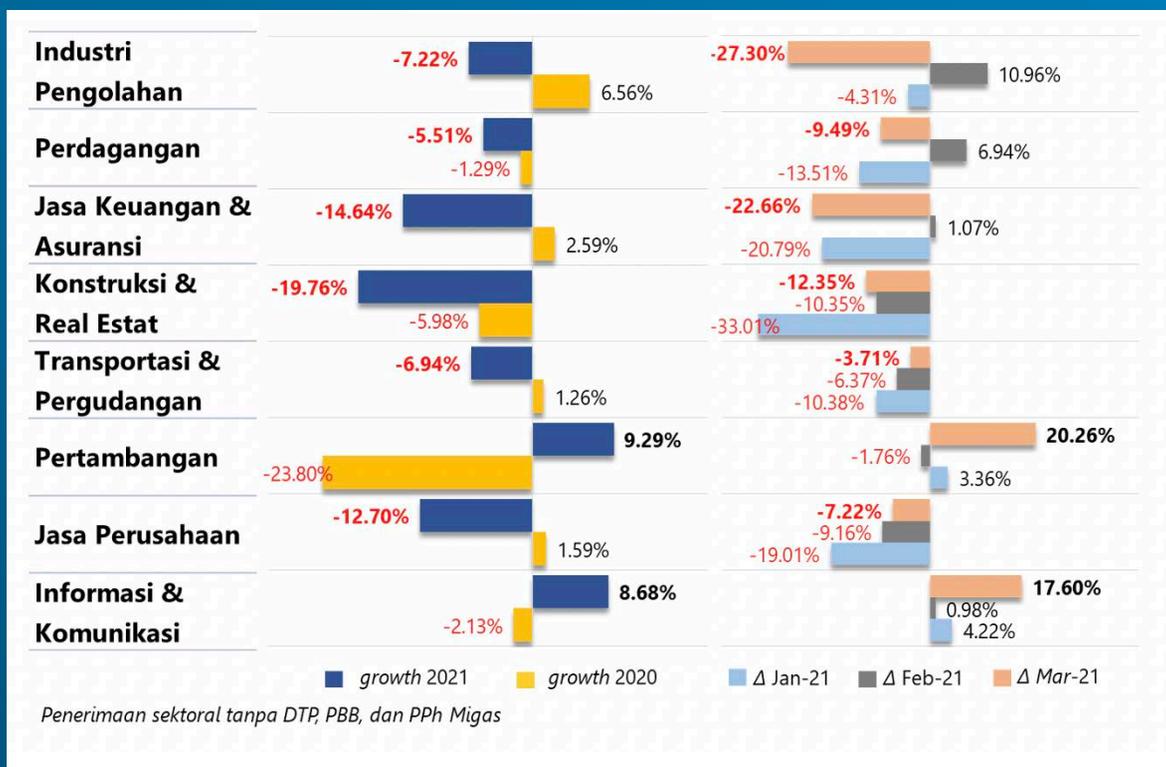
PPN Dalam Negeri mencatatkan pertumbuhan positif 4,11 persen (*yoy*). Kinerja pertumbuhan mengalami perlambatan akibat adanya pembayaran subsidi BBM T.A. 2018 pada bulan Maret 2020 yang tidak terulang pada Maret 2021, serta akibat meningkatnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*). Penerimaan bruto (tidak memperhitungkan *restitusi*) PPN Dalam Negeri terus tumbuh positif di bulan Maret, yang memberikan sinyal masih berlanjutnya momentum pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini juga tercermin pada kinerja PPN Impor, yang tumbuh positif 8,21 persen (*yoy*). Berdasarkan rilis BPS, nilai impor Januari – Maret 2021 sebesar US\$39,17 juta, meningkat US\$4.213,1 juta atau 10,76 persen (*yoy*). Diharapkan, tren pemulihan konsumsi masyarakat dapat ditopang momentum bulan suci Ramadhan – Idul Fitri 1442H. Dari sisi kebijakan *countercyclical*, Pemerintah juga mengupayakan menjaga permintaan (*demand*) masyarakat melalui subsidi ongkos kirim belanja *online* pada H-10 dan H-5 hari raya Idul Fitri. Kebijakan ini dirasa semakin penting mengingat di sisi lain Pemerintah akan memberlakukan

larangan mudik pada 6 – 17 Mei 2021.

PPh Pasal 26 tumbuh 1,56 persen (*yoy*), akibat penurunan *restitusi* serta kenaikan pembayaran atas Ketetapan Pajak. Kinerja pada bulan Maret mengalami perlambatan akibat penurunan dan pergeseran pembayaran *dividen*. Kenaikan pembayaran atas Ketetapan Pajak juga mendorong PPh Final tumbuh positif 0,60 persen (*yoy*). Kinerja pada bulan Maret melambat seiring dengan masih rendahnya tingkat suku bunga dan belum pulihnya kegiatan konstruksi, meski penjualan properti terpantau mulai meningkat.

Kinerja PPh Pasal 21 masih berada pada level -5,58 persen (*yoy*), akibat belum pulihnya serapan tenaga kerja, serta pemanfaatan insentif fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kinerja ini sedikit menguat dari -5,80 persen (*yoy*) sampai dengan Februari. Hal ini sejalan dengan tren utilisasi tenaga kerja yang terindikasi membaik. Sebagaimana ditunjukkan Survey Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (SKDU BI) Triwulan IV 2020, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tenaga kerja pada triwulan IV-2020 tercatat sebesar -10,18 persen, membaik dibandingkan -16,47persen pada triwulan III-2020, meski masih dalam level kontraksi. Perbaikan penggunaan tenaga kerja diperkirakan terus berlanjut pada triwulan I-2021 dengan SBT sebesar -0,40 persen.

Penerimaan Sektor-sektor Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)



Di sisi lain, kinerja PPh Badan masih berada pada level -40,48 persen (*yoy*), akibat efek gabungan perlambatan ekonomi, insentif pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 50 persen, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta peningkatan restitusi. Sedangkan PPh Pasal 22 Impor berada pada level -38,55 persen (*yoy*), dikarenakan semakin luasnya pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

Beralih ke perspektif sektoral, Sektor Pertambangan dan sektor Informasi & Komunikasi berada pada zona pertumbuhan positif, baik secara akumulatif maupun bulanan. Kinerja sektor Pertambangan didukung meningkat akibat penyerahan batubara yang mulai terutang PPN sejak November 2020. Sedangkan sektor Informasi & Komunikasi merupakan salah satu sektor yang masih mampu tumbuh di era pandemi, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi dan layanan informasi di era new normal dan work from home. Peningkatan kinerja pada bulan Maret didorong adanya transaksi penjualan dan penyewaan kembali (*sales and leaseback*) atas menara telekomunikasi salah satu Wajib Pajak operator seluler.

Perlambatan kinerja Industri Pengolahan disebabkan pembayaran subsidi BBM T.A. 2018 pada bulan Maret 2020 yang tidak terulang pada Maret 2021, peningkatan restitusi, peningkatan pemanfaatan insentif fiskal, serta penurunan PPN Dalam Negeri dari Subsektor Industri Pengolahan Tembakau seiring telah dinaikkannya cukai tembakau bulan lalu. Perlambatan sektor Perdagangan dikarenakan peningkatan restitusi dan peningkatan pemanfaatan insentif fiskal. Sektor Jasa Keuangan melambat karena restitusi yang kembali meningkat dan penurunan tingkat suku bunga.

Kinerja Sektor Konstruksi & Real Estat terlihat sedikit melambat dibandingkan bulan Februari. Hal ini disebabkan meningkatnya restitusi, meskipun kinerja penjualan real estat membaik, yang tercermin dalam peningkatan setoran PPh Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Untuk lebih menstimulasi sektor ini, pemerintah menyediakan insentif PPN DTP 100 persen untuk rumah tapak dan unit hunian rumah susun dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, dan 50 persen untuk kategori rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Neraca Perdagangan Indonesia bulan Maret 2021 surplus sebesar USD1,56 miliar atau USD5,41 miliar sepanjang periode Januari hingga Maret 2021. Surplus periode ini tercatat sebagai surplus terbesar bila dibandingkan periode yang sama dalam 5 tahun terakhir.



Kepabeanan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia bulan Maret 2021 kembali tercatat surplus USD 1,45 miliar, sekaligus menjadikan NP surplus dalam 3 kuartal berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP kali ini didorong surplus nonmigas, utamanya peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit dan besi & baja dasar ke Tiongkok. Sedangkan untuk sector migas masih mengalami defisit.

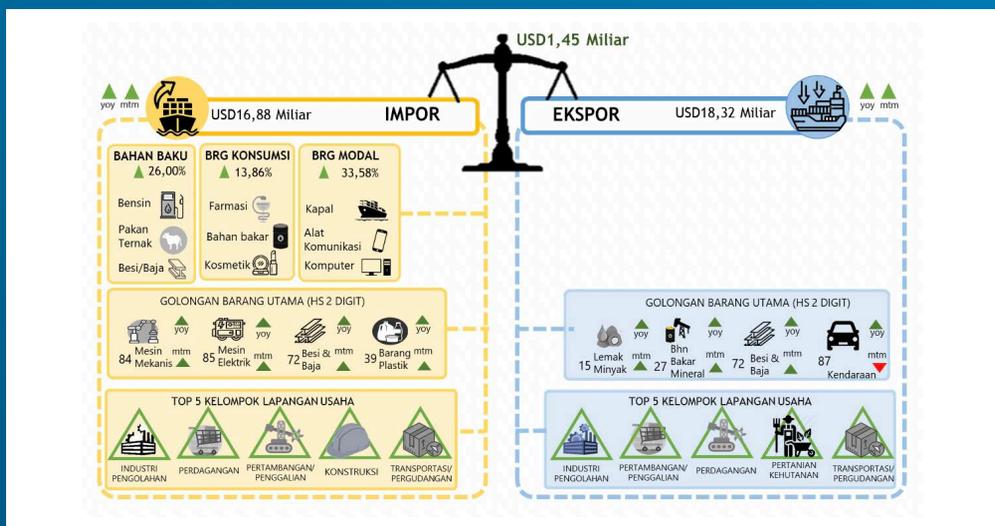
Kinerja ekspor bulan Maret 2021 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Maret 2020 mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 30,26 persen (yoy) atau 20,04 persen (mtm). Faktor masih tingginya harga CPO menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor kali ini, ditambah peningkatan ekspor besi dan baja dasar dengan negara

tujuan Tiongkok dan Pakistan serta minyak goreng kelapa sawit ke Tiongkok dan Pakistan.

Perbaikan kinerja ekspor dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya juga diikuti oleh kinerja dari impor untuk periode yang sama, dimana impor tercatat tumbuh sebesar 26,40 persen (yoy). Kontributor utama pertumbuhan impor bulan ini jika dilihat berdasarkan penggunaannya, hampir tumbuh di semua lini. Hal ini menjadi indikasi positif atas geliat ekonomi di dalam negeri.

Kenaikan harga tembaga, CPO dan batubara di pasar global menjadi salah satu faktor pendorong naiknya devisa ekspor Indonesia. Batubara misalnya, kenaikan harga dipengaruhi peningkatan konsumsi di Eropa yang memasuki musim dingin. Kenaikan harga CPO di

Realisasi penerimaan Kepabebean dan cukai



pasar global yang dipengaruhi produksi CPO Malaysia bulan November yang anjlok, dan harga **soybean oil** yang naik juga turut menjadi faktor naiknya devisa ekspor.

Dampak pertumbuhan ekspor dan impor tercermin pada realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai khususnya pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Maret 2021, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp62,29 triliun atau 28,98 persen dari target APBN tahun 2021. Capaian tersebut didorong kinerja penerimaan cukai yang tumbuh 70,10 persen (*yoy*), dan kinerja penerimaan BK yang tumbuh signifikan hingga 534,85 persen (*yoy*).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 31 Maret 2021 mencapai Rp48,27 triliun atau melambat 4,20 persen bila dibandingkan dengan penerimaan PDRI tahun 2020. Kondisi itu menunjukkan adanya tren perbaikan walau masih berada di zona negatif. Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC per 31 Maret adalah Rp110,56 triliun atau tumbuh sebesar 24,69 persen (*yoy*).

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari BM, BK dan Cukai, hingga kuartal 1 tahun 2021 ini masih dipengaruhi

oleh kondisi eksternal dan internal. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 cukup memberi tekanan penerimaan BK, namun masih tingginya harga patokan ekspor atas CPO mendorong pendapatan BK. Faktor lain seperti mulai pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai yang efektif dibulan Februari turut memengaruhi penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir Maret 2021 sebesar Rp8,11 triliun atau 24,46 persen dari target APBN 2021. Kinerja BM masih mengalami penurunan -3,57 persen (*yoy*) bila dibandingkan tahun lalu, meskipun terjadi peningkatan devisa bayar 10,98 persen (*yoy*). Penerimaan BM sudah mengalami tekanan sejak awal tahun. Walaupun penerimaan BM masih di zona negatif, namun terdapat indikasi tren perbaikan jika dilihat dari realisasi penerimaan BM secara bulanan sejak bulan Januari hingga Maret 2021 yang capaiannya terus meningkat.

Penerimaan cukai per 31 Maret 2021 mencapai Rp49,56 triliun atau 27,54 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri

Realisasi penerimaan Kepabebean dan cukai

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBN	REALISASI		GROWTH (y-o-y, %)		% CAPAIAN
			2020	2021	2020	2021	
1	BEA MASUK	33.17	8.41	8.11	-1.55	-3.57	24.46
2	CUKAI	180.00	29.14	49.56	36.50	70.10	27.54
	Hasil Tembakau	173.78	27.73	48.22	37.87	73.92	27.75
	Ethil Alkohol	0.16	0.08	0.03	182.86	-69.56	16.55
	MMEA	5.56	1.30	1.28	10.20	-1.61	23.03
	Denda Adm. Cukai	-	0.01	0.02	9.03	6.36	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.02	-23.27	121.47	-
	Plastik	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BEA KELUAR	1.79	0.73	4.61	-32.56	534.85	257.78
	TOTAL	214.96	38.28	62.29	23.60	62.72	28.98
	PPN Impor		37.00	40.04	-8.72	8.21	
	PPn BM Impor		1.08	0.67	30.73	-38.22	
	PPh Pasal 22 Impor		12.31	7.56	-8.51	-38.55	
	Total PDRI lainnya		50.39	48.27	-8.08	-4.20	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		88.67	110.56	3.36	24.69	

Sumber. Bukmer 5 April 2021

atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 70,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, dan pertumbuhannya menjadi yang tertinggi kedua setelah pertumbuhan penerimaan BK.

Penerimaan CHT per 31 Maret 2021 tumbuh signifikan sebesar 73,92 persen (*yoy*). Tingginya pertumbuhan disebabkan limpahan pelunasan pemesanan pita cukai tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp27 triliun (efek PMK 57/2017). Selain itu, tingginya pemesanan pita cukai atau produksi HT pada Januari, pengaruh kenaikan tarif yang berlaku di Februari, turut mendorong capaian penerimaan CHT bulan Maret 2021.

Kondisi berbeda terjadi pada pertumbuhan cukai lainnya, yang mencatat pertumbuhan negatif. Penerimaan cukai atas EA menjadi yang terendah di antara komponen cukai lainnya yaitu minus 69,56 persen (*yoy*), alhasil penerimaan cukai EA hingga akhir Maret 2021 melemah hanya Rp59,05 miliar.

Serupa dengan penerimaan yang turun, produksi EA di awal tahun 2021, juga turun lebih dari 69.59% (*yoy*). Pada bulan Maret 2020 terjadi *panic buying* atas produk sanitasi yg mendorong penerimaan maupun produksi EA tumbuh sangat tinggi dibanding tahun 2019, sedangkan tahun 2021 jumlah permintaan produk sanitasi sudah relatif stabil.

Penerimaan cukai MMEA per 31 Maret 2021 adalah Rp1,28 triliun atau tumbuh negatif 1,61 persen (*yoy*). Penurunan penerimaan cukai MMEA disebabkan oleh penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II tahun lalu, akibat kondisi pandemi yang memukul sektor pariwisata nasional.

Kinerja BK sampai dengan 31 Maret tumbuh signifikan 534.85 persen (*yoy*), didorong penerimaan BK tembaga dan produk kelapa sawit (CPO). Penerimaan BK Tembaga tumbuh 227.24 persen didukung peningkatan volume ekspor tembaga. Adapun BK produk Kelapa Sawit melesat 1.161,32 persen (*yoy*), dikontribusi CPO (Kuartal I – 2021) dengan tarif BK yang lebih besar (*yoy*) dan produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO).



**Pendapatan dari
Pengelolaan
Dana Kelapa
Sawit Mendorong
Peningkatan Kinerja
PNBP**

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2021 terealisasi sebesar Rp88,12 triliun atau mencapai 29,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Capaian ini masih mengalami kontraksi sebesar 8,41 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp96,21 triliun. Kontraksi realisasi PNBP sampai dengan bulan Maret 2021 ini utamanya dipengaruhi oleh turunnya realisasi ICP periode Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 serta turunnya realisasi *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi periode Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 yang menjadi dasar perhitungan PNBP hingga akhir Maret 2021.

Realisasi Pendapatan Sumber Daya

Alam (SDA) sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp24,12 triliun atau 23,17 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan SDA Migas sebesar Rp15,28 triliun dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp8,84 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, realisasi Pendapatan SDA terkontraksi sebesar 31,16 persen (yoy).

Pendapatan SDA Migas menunjukkan kontraksi sebesar 46,66 persen. Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp15,28 triliun atau 20,37 persen dari target APBN 2021. Faktor utama penurunan Pendapatan SDA Migas ini disebabkan lebih rendahnya realisasi ICP bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 sebesar US\$53.77 per barel (turun sebesar 14,73 persen)

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian (Miliar Rupiah)	APBN 2021	s.d. Maret 2021	% APBN	% Growth (yoy)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	298.204,17	88.116,37	29,55	(8,41)
A Pendapatan SDA	104.108,84	24.123,38	23,17	(31,16)
1 Migas	74.999,72	15.278,61	20,37	(46,66)
2 Nonmigas	29.109,12	8.844,77	30,38	38,14
a Pendapatan Pertambangan Minerba	22.100,54	7.470,10	33,80	39,46
b Pendapatan Kehutanan	4.613,28	997,72	21,63	50,91
c Pendapatan Perikanan	957,19	149,83	15,65	(7,30)
d Pendapatan Panas Bumi	1.438,12	227,12	15,79	1,48
B Pendapatan KND	26.130,49	1,33	0,01	(100,00)
C Pendapatan PNBP Lainnya	109.174,70	40.042,38	36,68	64,64
D Pendapatan BLU	58.790,14	23.949,28	40,74	86,09

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (US\$63.06 per barel). Penurunan ini juga disebabkan realisasi lifting minyak bumi periode Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 sebesar 687 mbopd yang lebih rendah (turun sebesar 6,99 persen) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (738 mbopd). Demikian pula, realisasi lifting gas bumi juga lebih rendah dari 1.086 mboepd menjadi 1.061 mboepd (turun sebesar 1,32 persen). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan realisasi lifting antara lain masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (workover), pemeliharaan sumur (well services), low demand dari buyer, serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu (hambatan pergerakan material dari/ke lapangan). Namun demikian, sinyal positif kenaikan Pendapatan SDA Migas diharapkan dapat segera terwujud dari tren kenaikan harga rata-rata minyak mentah sejak awal tahun 2021 (realisasi ICP bulan Maret 2021 sebesar US\$63.50 per barel).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp8,84 triliun atau 30,38 persen dari target APBN 2021. Pendapatan SDA Nonmigas tumbuh 38,14 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, dengan kontributor utama dari sektor Pertambangan Minerba

dan sektor Kehutanan. Realisasi PNBPN dari sektor Pertambangan Minerba mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 39,46 persen (yoy) seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi serta meningkatnya permintaan batu bara yang dijadikan sumber pembangkit listrik di Tiongkok. Hal tersebut menyebabkan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2021 yang sejauh ini terus menunjukkan tren positif (sejak kuartal IV tahun 2020). HBA pada bulan Maret 2021 sebesar US\$84.47 per ton, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret 2020 sebesar US\$67.08 per ton (naik sebesar 25,92 persen). Namun demikian, volume produksi batubara sampai dengan Maret 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 137,92 juta ton, lebih rendah dibandingkan dengan volume produksi sampai dengan Maret 2020 yang mencapai 149,60 juta ton. Kenaikan harga komoditas minerba lainnya (diluar batubara) di pasaran juga mendorong peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba yaitu tembaga, emas, perak, nikel, dan timah.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp997,72 miliar atau 21,63 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 50,91 persen (yoy). Kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan

antara lain disebabkan kenaikan realisasi Dana Reboisasi sebesar Rp33,6 miliar (naik sebesar 15 persen), Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp22 miliar (naik sebesar 11 persen), dan Penggunaan Kawasan Hutan sebesar Rp291,8 miliar (naik sebesar 140 persen). Kenaikan PNBPN dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan disebabkan adanya kenaikan realisasi produksi kayu sebesar 390.835 m³ (dari semula 12.624.700 m³ pada tahun 2020 menjadi sebesar 13.015.535 m³). Kenaikan produksi kayu ini disebabkan permintaan kayu oleh industri yang sudah mulai pulih. Sementara itu, kenaikan realisasi PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) disebabkan adanya pembayaran piutang PNBPN PKH sebesar Rp118 miliar dan kenaikan luas areal Penggunaan Kawasan Hutan dari seluas 50.077 hektar pada Maret 2020 menjadi seluas 89.750 hektar pada Maret 2021.

Adapun, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan sebesar Rp149,8 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 7,3 persen (*yoy*), yang antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah kapal yang mengajukan izin, baik untuk Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) maupun Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pada periode Januari-Maret 2021, terdapat 1.484 kapal yang mengajukan izin, sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 terdapat 1.718 kapal yang

mengajukan izin (turun sebesar 13,62 persen).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan bulan Maret 2021 mencapai Rp227,12 miliar atau 15,79 persen dari target APBN TA 2021, mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Perusahaan Panas Bumi yang utamanya berasal dari kenaikan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US\$.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp1,33 miliar atau turun 100,00 persen (*yoy*). Penurunan tersebut karena pada bulan Maret 2020 sudah terdapat setoran dividen Tahun Buku 2019 dari tiga bank Himbara. Adapun pada periode yang sama tahun 2021 belum terdapat setoran dividen Tahun Buku 2020 dari bank Himbara. Saat ini sebagian besar Laporan Keuangan BUMN Tahun Buku 2020 masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah proses audit tersebut, BUMN akan menyelenggarakan RUPS sehingga setoran dividen BUMN tahun 2021 yang berasal dari kinerja keuangan Tahun Buku 2020 diperkirakan baru mulai disetor pada triwulan II tahun 2021.

Adapun realisasi Pendapatan

PNBP Lainnya hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp40,04 triliun atau 36,68 persen dari target APBN 2021. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 64,64 persen (*yoy*). Kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara sebesar 50,16 persen dan Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 67,19 persen.

Realisasi PNBP dari PHT yang merupakan setoran dari wajib bayar Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sampai dengan Maret 2021 mencapai sebesar Rp5,5 triliun atau 32,21 persen dari target PHT dalam APBN 2021. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata sampai dengan Maret 2021 yang mencapai US\$84.47/ton. Kenaikan Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga utamanya berasal dari pendapatan premium obligasi negara, pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (antara lain pada belanja barang dan bantuan sosial), penempatan uang negara pada Bank Indonesia, serta pendapatan dari layanan komunikasi dan informatika, layanan pertanahan, dan layanan nikah di luar Kantor KUA.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp23,95 triliun atau 40,74 persen dari target APBN 2021. Realisasi ini menunjukkan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan sebesar 86,09 persen (*yoy*), yang utamanya diperoleh dari Pendapatan dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp14,79 triliun (naik sebesar 374,30 persen). Mulai pulihnya perekonomian global pasca vaksinasi Covid-19 di sejumlah negara semakin mendorong tumbuhnya konsumsi dan permintaan ekspor menuju ke kondisi normal. Namun demikian tumbuhnya kurva permintaan ini tidak didukung di sisi penawarannya. Kondisi pasar global saat ini mengalami kekurangan pasokan minyak sawit yang disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, turunnya produksi minyak sawit dari salah satu produsen utama dunia yakni Malaysia yang sempat melakukan kebijakan lockdown untuk menangani pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2021 dan faktor kedua yang lebih disebabkan adanya pengaruh badai El Nino. Kondisi tersebut meningkatkan harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global.



**Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat sampai
dengan 31 Maret 2021
tumbuh positif, didukung
oleh pertumbuhan realisasi
Belanja Modal, Belanja
Barang dan Bantuan Sosial.**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp350,08 triliun (17,91 persen dari pagu APBN 2021), tumbuh 25,98 persen (*yoy*) dari realisasinya di tahun 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan realisasi Belanja K/L, terutama Belanja Modal untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas serta Belanja Barang untuk pelaksanaan vaksinasi dan bantuan pelaku usaha, serta penyaluran berbagai program bansos.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp201,63 triliun atau tumbuh 41,16 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2020.

Untuk Belanja Pegawai, realisasinya sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp48,77 triliun atau 18,20 persen dari pagunya. Realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp63,68 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 81,58 persen (*yoy*) terhadap periode yang sama tahun 2020. Pertumbuhan tersebut utamanya untuk pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi seperti pengadaan obat-obatan dan pengadaan/pelaksanaan vaksinasi, pembayaran klaim biaya perawatan pasien Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan, pelaksanaan bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) oleh Kementerian Koperasi dan

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Maret 2021 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	2021			
	APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	1.031,96	201,63	19,54	41,16
Belanja Pegawai	267,96	48,77	18,20	0,27
Belanja Barang	360,79	63,68	17,65	81,58
Belanja Modal	246,78	34,21	13,86	186,19
Bantuan Sosial	156,44	54,96	35,13	16,52
Belanja Non-K/L	922,59	148,45	16,09	9,92
a.l. Belanja Pegawai	153,19	39,40	25,72	(6,01)
Subsidi	175,35	21,39	12,20	14,31
Belanja Lain-Lain	207,32	9,18	4,43	1.942,00
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	350,08	17,91	25,98

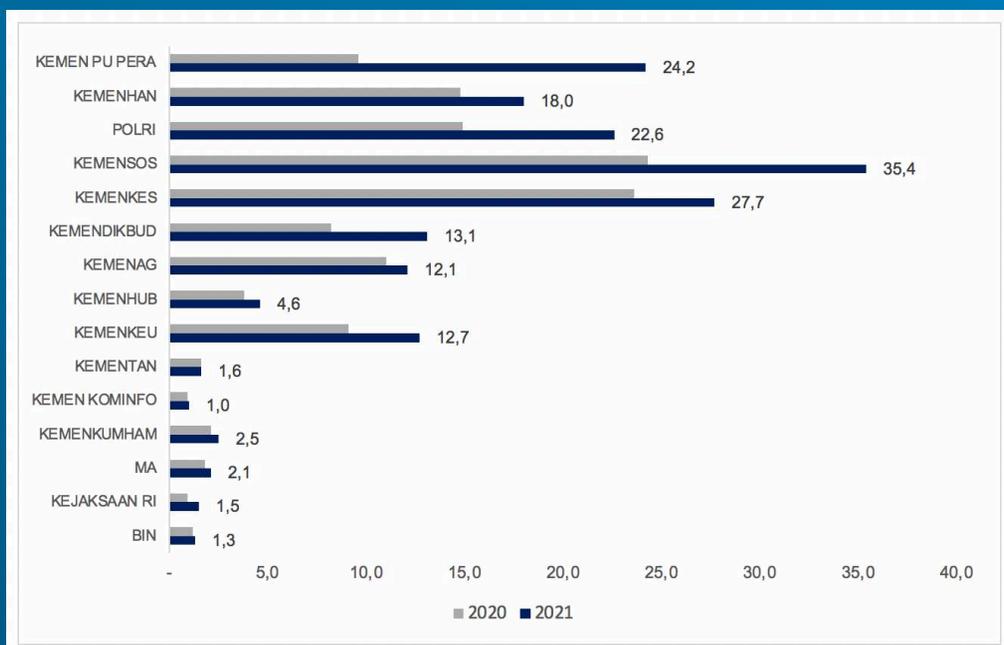
Usaha Kecil dan Menengah, pelaksanaan bantuan pendidikan dasar dan menengah (BOS dan beasiswa) oleh Kementerian Agama, dan Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel di BLU Kelapa Sawit oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, kinerja belanja barang juga dipengaruhi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pelayanan perkantoran yang dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain POLRI, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian PUPR. Namun di sisi lain, dampak pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi dan informasi telah membuahkan hasil, yaitu efisiensi pada anggaran belanja perjalanan dinas yang ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif sebesar 35,6 persen (*yoy*) terhadap realisasi pada periode yang sama tahun 2020.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp34,2 triliun atau 13,9 persen terhadap pagu APBN 2021, tumbuh signifikan 186,2 persen (*yoy*). Pertumbuhan realisasi belanja modal ini utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Realisasi belanja modal tersebut

ditopang oleh realisasi yang cukup besar pada jenis akun belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, belanja modal Peralatan dan Mesin serta belanja modal Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk: (1) preservasi dan rekonstruksi jalan, antara lain rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan fasilitas pendukung keselamatan jalan, rekonstruksi jembatan, serta pembangunan bendungan dan revitalisasi danau pada Kementerian PUPR; (2) pembangunan dan peningkatan jalur kereta api dan fasilitas pendukung perkeretaapian, serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bandar udara pada Kementerian Perhubungan; (3) pemenuhan almatsus (alat material khusus) di Kepolisian; dan (4) pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI.

Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp54,96 triliun atau sekitar 35,13 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi bansos tersebut tumbuh 16,51 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program bansos dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 antara lain melalui Program Bansos Tunai yang dilaksanakan sejak awal tahun dibandingkan tahun 2020 yang baru dimulai pada bulan April dan percepatan

Realisasi Belanja K/L s.d. Maret pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2020-2021 (Triliun Rupiah)



Capaian Output Strategis K/L Bidang Infrastruktur s.d. 31 Maret 2021

 <p>Pembangunan Bendungan progress 54,65% dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan</p>	 <p>Pembangunan Jembatan 1.799,80 m</p>
 <p>Jaringan irigasi progress 16,47% dari target pembangunan 600 km progress 18,34% dari target rehabilitasi 3.900 km</p>	 <p>Pembangunan Jalan 43,87 km</p>
 <p>Pembangunan Jalur KA progress 39,66% dari target 236,66 km'sp</p>	 <p>Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis (Wakatobi) progress fisik 40,17%</p>
	 <p>Pembangunan Pelabuhan (Likupang, Labuan Bajo, Sanur) progress fisik 32,40%</p>

pencairan bantuan Program Kartu Sembako. Pertumbuhan realisasi bansos tersebut juga dipengaruhi peningkatan realisasi program-program bansos reguler lainnya seperti peningkatan realisasi Program Indonesia Pintar sebagai hasil dari perbaikan mekanisme penyaluran bantuan kepada anak sekolah, dan peningkatan realisasi penyaluran bantuan KIP Kuliah kepada mahasiswa/i. Di samping peningkatan realisasi pada beberapa program bansos tersebut, penurunan realisasi terjadi pada beberapa program seperti menurunnya realisasi bantuan iuran JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dipengaruhi tidak adanya kebijakan penarikan di muka bantuan iuran JKN seperti yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagai dampak telah membaiknya kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, rendahnya realisasi bantuan iuran PBI JKN juga didorong oleh peran serta Pemda yang turut serta membayarkan sebagian premi iuran JKN segmen PBI tersebut.

Dari perspektif organisasi, peningkatan realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2021 secara umum disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar hingga mencapai 89,47 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya berfokus pada K/L di bidang perlindungan sosial dan kesehatan, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian

Kesehatan, antara lain untuk pencairan PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan penyediaan obat dan vaksin. Peningkatan kinerja belanja K/L juga didorong oleh K/L bidang infrastruktur seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, antara lain untuk pembangunan jalan, bendungan, jaringan irigasi, dan pembangunan jalur kereta api. Selain itu, realisasi Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI juga mendongkrak kinerja belanja K/L melalui pengadaan alutsista dan almatsus serta dukungan pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban/keamanan selama pandemi.

Capaian output strategis dari Belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2021 juga menunjukkan perkembangan yang baik. Dengan demikian, belanja K/L dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Maret 2021 mencapai Rp148,45 triliun (16,09 persen terhadap APBN 2021), tumbuh 9,92 persen (**yoy**) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2020.

Untuk realisasi Belanja Pegawai Non-K/L sampai dengan 31 Maret 2021 yang direalisasikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para



Masyarakat mendapat **suntikan vaksin 1 (8,1 jt)** dan **vaksin 2 (2,7 jt)**



Pembayaran **biaya perawatan 99 ribu pasien covid**



Penyaluran Bantuan luran Peserta **PBI JKN 96,5 juta jiwa**



Penyaluran **PKH 9,7 juta KPM**



Penyaluran **Bansos Tunai 9,59 juta KPM**



Penyaluran **Program Kartu Sembako 15,93 juta KPM**



Pemberian **KIP Kuliah 782 ribu Mahasiswa**



Bantuan **Pelaku Usaha Mikro 6,6 juta pelaku usaha mikro**



Penyaluran **PIP (SD s.d. SMA) 9,8 juta siswa**

pensiunan PNS/TNI/Polri, telah terealisasi sebesar Rp39,40 triliun, turun 6,01 persen (*yoy*). Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya nominal cicilan UPSL (*Unfunded Past Service Liability*) Program Tabungan Hari Tua (THT) PNS pada Tahun 2021, dibanding cicilan Tahun 2020 sejalan dengan kewajiban atas UPSL.

Sementara itu, realisasi Subsidi mencapai Rp21,39 triliun (12,20 persen terhadap APBN 2021), tumbuh 14,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi subsidi energi, utamanya untuk subsidi listrik yang tumbuh 22,1 persen (*yoy*), di samping subsidi minyak tanah dan subsidi LPG 3 kg. Dari sisi penyaluran, sampai dengan Februari 2021, volume penyaluran solar mencapai 2.223,24 ribu KL, minyak tanah mencapai 79,01 ribu KL, dan LPG 3 kg mencapai 1.165,78 juta kg, serta volume penyaluran/penjualan listrik bersubsidi sampai dengan Februari 2021 mencapai 11,6

tWh yang menjangkau sasaran sebanyak 37,3 juta pelanggan subsidi. Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi non energi sampai dengan Maret 2021, yaitu penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,9 juta ton, penyaluran KUR sebesar Rp58,5 triliun, Subsidi Bunga KUR kepada 1,6 juta debitur, dan Bantuan Perumahan kepada 1.736 unit rumah.

Selanjutnya, realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Maret tahun 2021 mencapai Rp9,18 triliun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp0,45 triliun. Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, yaitu Program Kartu Prakerja sebesar Rp8,53 triliun bagi lebih dari 2,77 juta peserta dari total 5 *batch*, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III sebesar Rp0,26 triliun.

**Memasuki Kuartal II
2021, Realisasi DAK Fisik
dan DAK Nonfisik Mulai
Menunjukkan Trend Positif**

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Sampai dengan 31 Maret 2021, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah sebesar Rp172,96 triliun atau 21,74 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,89 persen (*yoy*). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa daerah yang masih mengalami kendala dalam pemenuhan syarat pelaporan untuk penyaluran DAU.

Dana Perimbangan

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 31 Maret 2021 telah terealisasi sebesar Rp30,03 triliun atau 29,45 persen dari pagu, berasal dari penyaluran DBH reguler dan penyaluran Kurang Bayar DBH. Capaian yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 143,67 persen (*yoy*)

tersebut dipengaruhi adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp13,4 triliun untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA berdasarkan KMK-3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021. Penyaluran Kurang Bayar DBH pada KMK 3/ KM.7/2021 dilakukan dengan memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar DBH sebesar Rp2,4 triliun yang dicatat sebagai PNBPN Lainnya pada RKUN. Percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH diharapkan dapat memberikan penguatan bagi ruang fiskal daerah dalam mendukung pendanaan penanganan Covid-19 serta program pemberian vaksin di daerah.

Per 31 Maret 2021, DAU telah disalurkan sebesar Rp104,02

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021
Tanggal: 1 – 31 Maret 2021 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2020		2021		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763.925,65	174.516,80	795.479,48	172.961,90	21,74
Transfer ke Daerah	692.735,65	167.300,20	723.479,48	162.405,84	22,45
A. Dana Perimbangan	653.358,92	167.102,20	688.676,56	162.084,48	23,54
1. Dana Transfer Umum	470.800,22	142.303,35	492.253,01	134.056,09	27,23
a. Dana Bagi Hasil	86.418,70	12.324,77	101.961,62	30.031,61	29,45
b. Dana Alokasi Umum	384.381,52	129.978,59	390.291,39	104.024,47	26,65
2. Dana Transfer Khusus	182.958,70	24.798,84	196.423,55	28.028,40	14,27
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53.787,35	43,44	65.248,20	73,81	0,11
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.771,35	24.755,40	131.175,35	27.954,58	21,31
B. Dana Insentif Daerah	18.500,00	-	13.500,00	123,36	0,91
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.876,73	198,00	21.302,92	198,00	0,93
1. Dana Otsus	19.556,73	-	19.982,92	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.555,28	-	7.805,83	-	-
b. Provinsi Aceh	7.555,28	-	7.805,83	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.446,17	-	4.371,26	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	198,00	1.320,00	198,00	15,00
Dana Desa	71.190,00	7.216,60	72.000,00	10.556,06	14,66

triliun atau 26,65 persen dari pagu DAU TA 2021. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 19,97 persen (*yoy*) yang disebabkan beberapa daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran DAU Bulan Februari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otsus dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

Realisasi DAU di atas telah memperhitungkan realisasi Penyaluran DAU Bulan Januari kepada 3 daerah, DAU Bulan Februari kepada 55 daerah, DAU Bulan Maret kepada 52 daerah, dan DAU Bulan April kepada 166 daerah. Realisasi tersebut juga turut dipengaruhi oleh penerapan sanksi penundaan DAU Bulan Februari bagi 2 pemerintah daerah dan DAU Bulan April bagi 1 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Data/Informasi Keuangan Daerah serta penyaluran kembali DAU Bulan Februari kepada 5 Daerah yang terkena sanksi penundaan DAU.

Hingga akhir Maret 2021, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp73,81

miliar atau sebesar 0,11 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 69,92 persen (*yoy*) yang disebabkan percepatan proses pengadaan barang/jasa oleh daerah berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui kementerian/lembaga. Di sisi lain, saat ini daerah sedang menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran lainnya seperti Perda APBD, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun sebelumnya, dan foto kegiatan tahun sebelumnya.

Sementara itu, penyaluran DAK Nonfisik per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp27,95 triliun atau 21,31 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 12,92 persen (*yoy*) yang disebabkan sebagian besar jenis DAK Nonfisik telah disalurkan sesuai jadwal pelaksanaan penyaluran. Adapun beberapa jenis lainnya yang belum disalurkan, saat ini masih menunggu ditetapkannya petunjuk teknis dari kementerian/lembaga terkait.

Dana Insentif Daerah (DID)

Berbeda dengan tahun sebelumnya, per akhir Maret 2021, telah terdapat realisasi penyaluran DID sebesar Rp123,36 miliar atau 0,91 persen dari pagu. Di bulan Maret terdapat tujuh daerah yang telah disalurkan alokasi DID tahap I sebesar 50 persen dari besaran alokasi daerah tersebut.

Hingga 31 Maret 2021 masih berkisar 49,8 persen daerah yang telah memenuhi syarat salur penyampaian laporan tahun sebelumnya, dan baru 1,9 persen daerah yang telah memenuhi syarat salur penyampaian rencana penggunaan DID TA 2021.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. YOGYAKARTA

Hingga 31 Maret 2021, belum terdapat realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus. Berdasarkan amanat dalam PMK Nomor 233/PMK.07/2020 penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap 1 dilakukan paling cepat bulan Februari setelah Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerima permintaan salur yang dilampirkan dengan dokumen syarat salur dari Gubernur. Sampai dengan akhir Maret 2021, kelengkapan syarat salur Tahap I Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat belum seluruhnya tersedia, terutama rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri terkait penyaluran tahap 1 TA 2021, sehingga penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk tahap I belum dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta tahap 1 telah terealisasi sebesar Rp198,00 miliar atau 15 persen dari pagu pada tanggal 1 Maret 2021. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 15/PMK.07/2020, penyaluran tahap 2 baru dapat dilakukan paling cepat pada bulan April.

Dana Desa

Dana Desa yang telah disalurkan hingga 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp10,56 triliun atau 14,66 persen dari pagu, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 46,27 persen (*yoy*). BLT Desa sebagai jaring pengaman sosial masih diberikan kepada keluarga miskin di desa yang tidak menerima program bantuan sosial dari Pemerintah seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Tunai. Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan sebesar Rp405,30 miliar kepada 13.196 desa.

Selanjutnya, selain digunakan utk BLT Desa, Dana Desa juga di-*earmaked* penggunaannya paling sedikit 8 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di tingkat desa sebagaimana diamanatkan oleh PMK Nomor 17/PMK.07/2021. Dalam upaya mempercepat penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021. Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp2,27 triliun kepada 29.041 desa dan untuk Desa yang telah mendapat penyaluran Dana Desa tahap I, maka Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 diambil dari Dana Desa Tahap I yang sudah salur.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



**Pembiayaan utang
dikelola dengan prudent,
felksibel,dan oportunistik,
serta terukur dalam
mendukung Pemulihan
Ekonomi Nasional**

Pembiayaan Utang

Dengan target defisit APBN tahun 2021 yang sebesar 5,7 persen, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun. Sampai dengan akhir Maret 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp328,46 triliun atau 32,1 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp337,21 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp8,74 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,2 miliar, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp18,6 miliar, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp9,77 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp18,41 triliun.

Sampai dengan akhir Maret 2021, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp413,95 triliun, terdiri dari penerbitan SUN sebesar Rp313,75 triliun dan SBSN sebesar Rp100,20 triliun, termasuk pembelian SBN oleh Bank Indonesia sesuai dengan SKB I yang mencapai Rp91,77 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp57,23 triliun dan SBSN sebesar Rp34,54 triliun.

Sementara dari sisi pinjaman, selama bulan Maret 2021, telah dilakukan beberapa penarikan pinjaman kegiatan yang ditujukan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kepolisian Negara RI,

PEMBIAYAAN UTANG

Maret 2021

Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel, oportunistik, serta terukur dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang Maret 2021

 Rp **328.464,5**

Realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp328,46 triliun atau 32,1 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp337,21 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp8,74 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) Maret 2021



Rp **337.205,6**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman (Neto) Maret 2021



Rp **(8.741,1)**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(6,3)**

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp **12,3**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



Rp **(18,6)**

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(8.734,8)**

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp **9.676,5**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp **(18.411,3)**

dan PT. PLN. Selain itu, juga telah dilakukan penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,2 miliar yang ditujukan untuk Kementerian Pertahanan.

Selama bulan Maret 2021, tercatat terdapat tiga pinjaman bilateral dan satu pinjaman multilateral yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, antara lain:

1. Perjanjian pinjaman bilateral dengan Pemerintah Austria melalui Raiffeisen Bank International AG yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan *Maritime Vocational Training Center* (VTC) di Makassar.
2. Perjanjian pinjaman bilateral dengan Pemerintah Perancis melalui *Agence Française De Développement* (AFD) yang akan dimanfaatkan untuk *Financial Sector Reform Development Policy Program*, yaitu untuk mendukung upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan keuangan inklusi
3. Perjanjian pinjaman bilateral dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan dimanfaatkan untuk *Disaster Resilience Enhancement and Management Program Loan* (II) guna mendukung implementasi kebijakan dan strategi terkait kebencanaan melalui *policy dialogue*

yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan kapasitas pengelolaan bencana alam.

4. Perjanjian pinjaman multilateral dengan World Bank untuk membiayai program *Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance* (IDRFI), dalam rangka membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana alam melalui pembentukan *Pooling Fund* Bencana.

Realisasi pembiayaan utang sampai dengan akhir Maret 2021 masih terjaga. Dengan penguatan PEN dan upaya percepatan vaksinasi, kondisi ekonomi ke depan diharapkan membaik sementara target defisit afhyb APBN 2021 diharapkan menjadi lebih kecil dibandingkan defisit 2020.

Posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2021 berada di angka Rp6.445,07 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,64 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA,

PERINGKAT KREDIT INDONESIA TETAP
DI LEVEL INVESTMENT GRADE

Maret 2021

Posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2021 berada di angka Rp6.445,07 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,64 persen.

Pinjaman
Rp**861,91**

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp12,52
- Pinjaman Luar Negeri
Rp849,38

• Bilateral	323,144
• Multilateral	482,02
• Commercial Banks	44,23
• Suppliers	-

(dalam triliun rupiah)

13,37%

86,63%

Surat Berharga Negara

Rp**5.583,16**

- Domestik
Rp4.311,57
- Surat Utang Negara 3.510,47
- Surat Berharga Syariah Negara 801,10
(dalam triliun rupiah)
- Valas
Rp1.271,59
- Surat Utang Negara 1.024,59
- Surat Berharga Syariah Negara 247,00
(dalam triliun rupiah)



Debt to GDP : 41,64%

POSISI UTANG PER **AKHIR MARET 2021** : Rp**6.445,07** (dalam triliun rupiah)

Di tengah penurunan peringkat kredit terhadap sebagian besar negara-negara lain sebagai dampak pandemi, 3 lembaga pemeringkat seperti, Moodys (Baa2/stable), Fitch Ratings (BBB/stable), dan R&I (BBB+/stable) justru

mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level sebelumnya.



Pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan, hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang Pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN Domestik, hingga akhir Maret 2021 mencapai 66,90 persen dari total komposisi utang. Sementara itu, dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 67,09 persen dari total komposisi utang pada akhir Maret 2021.

Peningkatan utang Pemerintah juga dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, tak hanya Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan belanja yang cukup besar terutama untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi dan penyediaan program vaksinasi gratis. Faktanya, kebijakan pelebaran defisit dan rasio utang Pemerintah di masa pandemi merupakan salah satu yang terkecil dibandingkan beberapa negara ASEAN dan G20.

Namun demikian, peningkatan pembiayaan Pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Selain itu, pengelolaan utang Pemerintah dikelola dengan terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengingat terdapat fungsi pengawasan dan

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Selama kuartal I 2021, empat lembaga pemeringkat kredit telah melakukan asesmen tahunannya terhadap Indonesia, antara lain: Moodys pada bulan Januari, Fitch Ratings pada bulan Februari, serta S&P dan R&I pada bulan Maret. Di tengah penurunan peringkat kredit terhadap sebagian besar negara-negara lain sebagai dampak pandemi, keempat lembaga pemeringkat tersebut justru mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level sebelumnya, yaitu Moodys pada *Baa2/stable*, Fitch pada *BBB/stable*, serta yang terbaru adalah R&I dan S&P yang mengafirmasi peringkat kredit Indonesia masing-masing pada *BBB+/stable* dan *BBB/negative*.

Hasil asesmen Moodys merujuk pada kondisi perekonomian Indonesia yang cukup besar serta defisit fiskal dan utang yang rendah di tengah pandemi. Sementara Fitch mengapresiasi kemampuan Indonesia untuk bertahan dari guncangan yang ditimbulkan oleh pandemi tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian jangka menengah dengan adanya skenario konsolidasi fiskal yang baik. Sementara, R&I, percaya bahwa Indonesia dapat mengembalikan kondisi ekonominya ke tingkat sebelum pandemi dalam satu hingga dua tahun ke depan, dilihat dari upaya komitmen Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural dan respon kebijakan yang fleksibel dari Pemerintah dan Bank Indonesia serta cadangan devisa yang cukup. Tidak berbeda jauh dengan penilaian R&I, lembaga pemeringkat utang S&P menekankan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan rekam jejak pengelolaan disiplin fiskal yang baik, didukung respon komprehensif Pemerintah dalam menghadapi pandemi yang dianggap mampu meredam dampak sosio-ekonomi yang lebih dalam

